

SKRIPSI

**ANALISIS STRATEGI POLITIK PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)
DALAM MEMENANGKAN PEMILU LEGISLATIF 2009
DI PEKANBARU**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Strata Satu (S1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH

MUHAMMAD HANAFI

NIM: 10675005158

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2010**

ABSTRAK

ANALISIS STRATEGI POLITIK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DALAM MEMENANGKAN PEMILU LEGISLATIF 2009

DI PEKANBARU

OEH : MUHAMMAD HANAFI

Penetapan DPD Kota Pekanbaru dilaksanakan pada tanggal 26 Jumadil Akhir 1424 H atau bertepatan dengan tanggal 25 Agustus 2003 M melalui Surat Keputusan Partai Keadilan Sejahtera Propinsi Riau nomor : 30/SKEP/AD-PKS/VI/1424 Tentang Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru. Dalam menghadapi pemilihan umum legislatif 2009 di Pekanbaru Partai Keadilan Sejahtera sebagai Partai Dakwah untuk memenangkan pemilihan umum harus mempersiapkan kader-kader yang terbaik yang dimiliki untuk diusung menghadapi pemilihan umum legislative untuk memperebut kursi di DPRD Kota Pekanbaru dan mempersiapkan proses kampanye untuk mempromosikan kader-kader ke masyarakat dengan menggunakan icon partai yaitu Bersih, Peduli dan Profesional serta Partai Keadilan Sejahtera Pekanbaru perlu menjaga 5 syarat kemenangan (istihqaq an-najah). Lima persyaratan bagi manusia secara individu, kelompok atau organisasi, termasuk Partai Keadilan Sejahtera Pekanbaru sebagai Partai Dakwah berhak untuk mendapatkan kemenangan. Karena kemenangan itu diberikan oleh Allah SWT, datangnya dari Allah SWT. Syarat kemenangan itu adalah; Pertama, harus memiliki al-qiyam tastahiqun najah, yakni nilai-nilai yang membuat kita berhak meraih kemenangan atau disebut winning value. Kedua, harus memiliki al-manhaju yastahiqqun najjah, atau winning concept. Ketiga, harus memiliki an-nizham yastahiqqun najah atau winning system. Keempat, harus memiliki al-jama'atu tastahiqqun najah, atau winning team. Kelima, harus memiliki al-ghoyatu tastahiqqun najah, atau winning goal. Kalau disingkat, maka syarat-syarat untuk memperoleh kemenangan itu adalah 5-W. untuk berhak memperoleh kemenangan, yang datangnya dari Allah SWT, maka perlu nilai, konsep, system, tim dan goal yang jelas. Tanpa adanya 5-W ini, atau tidak terpenuhinya syarat-syarat ini, maka ikhtiar untuk memperoleh kemenangan dalam pemilihan umum sangat lemah.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang Masalah	1
I.2. Perumusan Masalah	15
I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
I.4. Sistematika Penulisan	16
BAB II. TELAAH PUSTAKA	
II.1 Demokrasi	18
II.2 Partai Politik	21
II.3 Teori Strategi	27
II.4 Strategi Politik Dalam memenangkan Pemilu	28
II.5 Konsep Operasional	42
II.6 hipotesis	44
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
III.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	45
III.2 Jenis dan sumber Data	45
III.3 Populasi dan Sampel	45
III.4 Teknik Pengumpulan Data	47
III.5 Analisis Data	47
BAB IV. GAMBARAN UMUM	

IV.1 Sejarah Terbentuknya PKS	48
IV.2 Hubungan Partai Keadilan Dengan Partai Keadilan Sejahtera	49
IV.3 Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera	50
IV.4 Prinsip Kebijakan Partai Keadilan sejahtera	53
IV.5 Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru	56
BAB V. Hasil Penelitian Dan Pembahasan	
V.1 Identitas Responden	60
V.2 Strategi PKS dalam Memenangkan Pemilu Legislatif di Kota Pekanbaru Tahun 2009	63
V.3 Strategi PKS Dalam Berkampanye	70
V.4 Wawancara Terhadap Strategi Politik Partai dalam Memenangkan Pemilu	80
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	
VI.1 Kesimpulan penelitian	95
VI.2 Saran-saran	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang sangat menarik untuk dipelajari lebih jauh, berbicara mengenai demokrasi maka tidak bisa lepas dari beberapa unsur yang menjadi bagian dari demokrasi itu sendiri salah satunya adalah Partai Politik (Parpol). Salah satu esensi terpenting dari demokrasi modern adalah adanya pelembagaan institusi politik seperti halnya partai-partai politik.

Pemilihan umum adalah kunci utama untuk memasuki rumah tangga negara secara modern dan demokratis. Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila telah mendeklarasikan diri sebagai negara demokratis, maka sangatlah wajar dan nalar apabila instrumen pemilu sebagai cara untuk memulai melembagakan tatanan baru tersebut. (Juri Ardiantoro.1999:33). Di dalam Al-qur'an Allah SWT berfirman :



“Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.”
(QS. Al A’raaf : 58)

Melalui pemilu, parpol yang berkedudukan sebagai kontestan berusaha bersaing satu dengan yang lainya untuk memperoleh dukungan dari rakyat/ warga negara. Parpol yang memperoleh dukungan yang paling besar dari rakyat dengan sendirinya menempatkan paling banyak anggota-anggota dalam jabatan publik, maka parpol tersebut bisa memperoleh kekuasaan yang relatif besar apabila dibandingkan dengan kekuasaan yang diperoleh partai lain. Dengan kekuasaan yang diperolehnya itu, parpol tersebut pada giliranya akan dapat mengendalikan jalanya roda pemerintahan.

Pada awal pertama Indonesia Merdeka sudah barang tentu kita tidak langsung mengadakan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk menentukan jumlah kursi yang harus dimiliki suatu partai politik, oleh karena itu, walaupun Partai Politik sudah terbentuk jauh sebelum Indonesia merdeka, mereka yang memilih Presiden dan Wakil Presiden serta membuat konstitusi adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Setelah mengalami dua kali peperangan besar akibat penyerbuan kembali tentara belanda, barulah pada tahun 1955 dilakukan Pemilihan Umum untuk pertama

kalinya. Yang diikuti oleh 70 kontestan Partai Politik. Setelah Pemilihan Umum Tahun 1955 Pemerintah Orde Lama tidak lagi melakukan Pemilihan Umum. Bahkan Legislatif menyatakan Bung Karno sebagai Presiden seumur hidup. Hal ini berakhir sampai kejatuhan Bung Karno setelah peristiwa G-30 S PKI.

Kemudian, Pemerintah Orde Lama mempersiapkan Pemilihan Umum dengan matang. Yaitu dengan memasukan ABRI dan KORPRI dalam perpolitikan (dalam keberadaan Golkar). Berdasarkan UUD 1945 utusan daerah dan utusan golongan juga bernuansa Golkar. Karena persiapannya inilah Pemilihan Umum baru diselenggarakan pada tahun 1971 yang terdiri dari 10 kontestan Partai Politik.

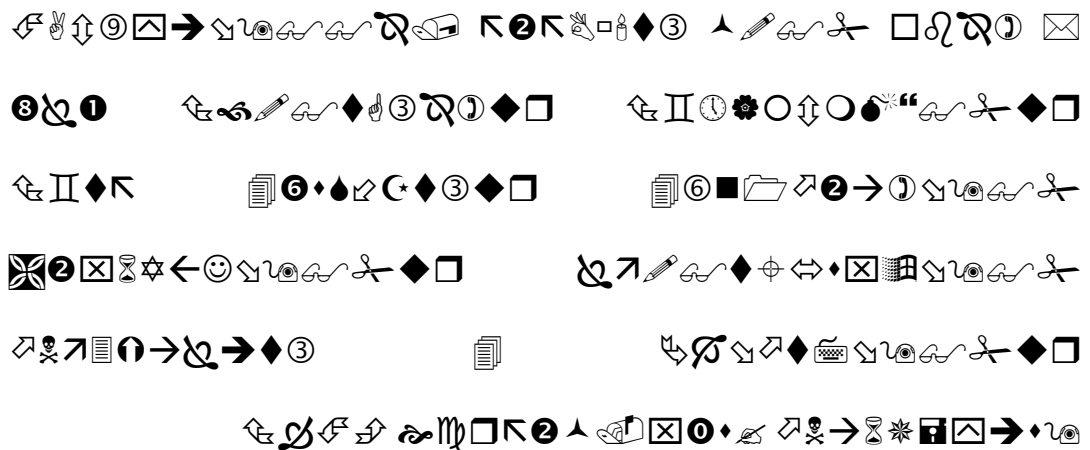
Dalam Pemilihan Umum 1977 Partai-partai politik digabung menjadi dua partai besar. Yaitu partai-partai Kristen, seperti Parkindo dan Partai Katolik ditambah dengan PNI, Murba dan IPKI menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sedangkan kumpulan Partai-partai Islam seperti NU, Parmusi, PSII dan Perti menjadi PPP.

Kemudian, pada pemilihan umum tahun 1982 tidak banyak perbedaan yang menyolok dibandingkan Pemilu tahun 1977 sebelumnya. Hanya saja dalam pemilu 1987 para peserta pemilu harus mempunyai asas Pancasila. Dengan demikian perlombaan pengaruh antar para kontestan dalam setiap pemilu adalah hanya pada program kerja masing-masing saja.

Pada masa reformasi telah dilakukan pemilihan umum sebanyak 3 kali, yakni; pemilu tahun 1999, 2004 dan 2009. Pada pemilu 1999 terus berkembang partai yang berbasis Islam. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia menganut Agama Islam. Belakangan ini di Indonesia yang penduduknya sekitar 85% menganut

Islam, ternyata existensi partai Islam dibawah partai-partai Nasionalis. hal ini bisa dilihat sejak pemilu 1999, 2004 dan 2009 baru-baru ini.

Jika berbicara mengenai partai politik yang berbasis Islam maka tidak lepas dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Karena dari tiga dekade pemilihan umum hanya PKS lah yang terus menunjukkan existensi partai yang berbasis Islam. Oleh sebab itu, corak bentuk dan proses perjuangan politik Islam harus mencerminkan watak idiologi Islam itu sendiri. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman :



“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. 16:90)

Partai yang berasal dari Partai Keadilan ini didirikan pada tanggal 20 Juli 1998 ternyata cukup menimbulkan keterkejutan publik Indonesia yang saat itu sedang mengalami *euphoria* politik yang luar biasa. Hal ini dikarenakan Partai Keadilan

dalam mendeklarasikan partainya sangat jauh berbeda dengan partai-partai lain. Sebagaimana dilansir oleh berbagai media massa, peresmian Partai Keadilan di Jakarta saat itu dilakukan secara massal. Hadir sekitar lima puluh ribu pendukungnya, disertai dengan berbagai pertunjukan seni Islam. Selain itu, sebagian besar pendukung partai yang hadir adalah anak-anak muda dengan penampilan fisik yang sangat khas dan berbeda dari masyarakat Indonesia pada umumnya. Para pendukung dari kalangan perempuan hampir semuanya mengenakan jilbab yang panjang dan lebar, sementara kalangan pria kebanyakan mempunyai janggut. Bukan itu saja kebanyakan dari mereka berasal dari golongan terdidik yang terdiri mahasiswa dan para intelektual muda.

Meskipun dalam konstelasi politik Indonesia Partai Keadilan dapat dimasukkan ke dalam barisan partai-partai Islam yang memang marak berdiri saat itu. Namun agaknya sulit untuk mencari kesamaan antara Partai Keadilan dengan partai-partai Islam lainnya, yang umumnya memiliki keterkaitan historis dan ideologis dengan partai-partai Islam dimasa lalu. Namun demikian bukan berarti kemunculan Partai Keadilan tidak mempunyai akar historis sama sekali dengan dinamika sosial politik di Indonesia. Bahkan dalam pengakuan Nur Mahmudi Ismail (Presiden Pertama Partai Keadilan) Partai Keadilan justru mempunyai akar historis dan ideologis yang sangat panjang.

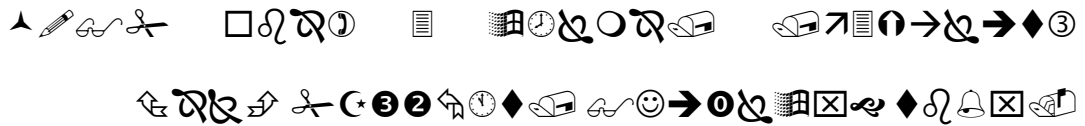
Jika kita lihat dari tiga dekade pemilihan umum ternyata Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai yang terus berkembang diantara partai-partai Islam lainnya hal ini dibuktikan dari tiga dekade pemilihan umum yang berlangsung. Partai yang

awalnya bernama Partai keadilan ini pada pemilu 1999 memperoleh jumlah suara **1.436.565** dari 48 partai politik.

Dalam pertarungan Pemilu 1999 ini, keberadaan Partai Keadilan menjadi fenomena tersendiri yang memberi warna baru dalam politik Indonesia, bahkan mendapat julukan sebagai *the rising star*, sebagaimana dilansir beberapa media massa. *Performance* sebagai Partai yang dimotori kaum muda, terdidik dan simpatik dalam berkempanye menjadi kelebihan tersendiri yang hanya dimiliki oleh Partai Keadilan.

Perolehan suara Partai Keadilan yang tergolong cukup signifikan, yaitu sebanyak 1.436.565 suara atau sebesar 1.36% dari jumlah total suara, juga mampu mengantarkan Partai Keadilan sebagai tujuh partai besar (*the big seven*). Namun Partai Keadilan tidak termasuk kedalam golongan partai pemenang pemilu, karena tidak mampu memenuhi batas minimal *electoral threshold* sebesar 2%, sebagaimana tercantum dalam UU No.3 Tahun 1999 mengenai Pemilu. Jadi Partai pemenang pemilu merupakan partai yang mampu menembus batas minimal *electoral threshold*.

Namun, sebagai partai baru yang belum memiliki pengalaman politik sama sekali, hal ini menjadi catatan prestasi tersendiri bagi Partai Keadilan. Terlebih lagi jumlah tersebut juga mengungguli perolehan suara beberapa partai Islam lainnya, padahal kebanyakan partai-partai Islam tersebut mengklaim sebagai pewaris partai-partai Islam dimasa lalu.



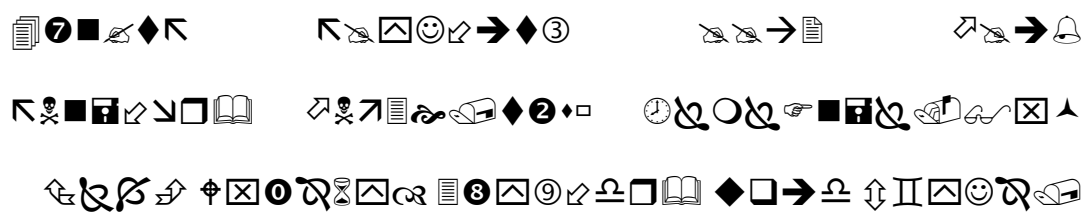
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat” (QS.4:58)

Karena itu pula maka Partai Keadilan menegaskan jati dirinya sebagai partai dakwah (*hizb ad-da'wah*). Dengan paradigma semacam itu, Partai Keadilan menjadikan aktivitas politik yang mereka jalani sebagai salah satu bagian dari keseluruhan wilayah dakwah yang digeluti partai tersebut.

Namun demikian, untuk mempertahankan eksistensi politiknya, Partai Keadilan yang meyakini keberadaan partai politik sebagai sarana penting untuk melakukan perbaikan masyarakat dan sistem politik, memelopori tuntutan perubahan ketentuan UU Pemilu tentang *electoral threshold* seharusnya diberikan pada pemilu 2004, mengingat rentang waktu antara pendirian partai-partai baru dan pemilu 1999 yang terlampau singkat.

Dalam tataran realitas, meskipun Partai Keadilan sudah mengupayakan banyak cara untuk memperjuangkan aspirasinya baik melalui praktek lobi di DPR maupun dengan melakukan konsolidasi partai-partai kecil ketentuan undang-undang

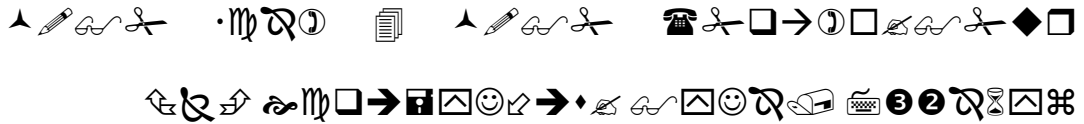
Pemilu No.3 Tahun 1999 yang mengatur *electoral threshold* tetap diberlakukan. Ini berarti, Partai Keadilan tidak akan bisa mengikuti pemilu 2004, kecuali jika ia mengganti kendaraan politiknya atau bergabung dengan partai lain. Mengingat pesan Allah dalam Al-Quran :



“Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya[867] masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya” (QS. 17: 84)

Dalam konteks inilah kemudian muncul wacana mengenai pembentukan partai baru dikalangan internal Partai Keadilan. Realitas politik yang ada pada akhirnya memaksa Partai Keadilan untuk membentuk partai baru sebagai kendaraan politiknya. Menyangkut hal ini juga Allah SWT berfirman :





“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS.5 : 8)

Karena tidak memenuhi *electoral threshold* dilanjutkan dengan Partai Keadilan Sejahtera pada pemilihan umum 2004, dengan perolehan suara **8.325.020** merupakan peringkat ke-8 dari 24 partai politik dan peringkat ke-3 dari partai Islam lainnya. Kemudian pada pemilu 2009 memperoleh **8.206.955** suara. Merupakan peringkat ke-4 dari 44 partai politik dan peringkat 1 dari partai yang berbasis Islam. Berikut ini hasil penghitungan suara partai politik yang masuk dalam 5 besar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I.1 : Perolehan Suara 5 Besar Partai Politik Pada Pemilihan Umum

Tahun 2009

No	Nama Partai	Perolehan Suara	Persentase
1	Partai Demokrat	21.703.137	20.85%

2	Partai Golongan Karya	15.037.757	14.45%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14.600.091	14.03%
4	Partai Keadilan Sejahtera	8.206.955	7.88%
5	Partai Amanat Nasional	6.254.580	6.01%

Sumber : DPD PKS Pekanbaru

Tabel 1.1 diatas menjelaskan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera sebanyak **8.206.955** suara. Dengan perolehan suara tersebut Partai Keadilan Sejahtera Menduduki Peringkat Ke-4 suara terbanyak dan menduduki Peringkat 1 dari partai Islam lainnya.

Sedangkan di Provinsi Riau, khususnya di Kota Pekanbaru Partai Keadilan Sejahtera yang menggunakan Islam sebagai asas partainya merupakan partai politik baru yang ikut dalam Pemilu 2004. Di Kota Pekanbaru ternyata dapat menduduki posisi ke 3(tiga), padahal kalau dilihat dari masa berdirinya Partai Keadilan Sejahtera di Kota Pekanbaru keberadaannya masih sangat baru, hanya memiliki waktu tujuh bulan sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Hal ini sesuai dengan tanggal pembentukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru yang didasarkan pada **Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Riau Nomor : 30/SKEP/AD-PKS/IV/1424**. Posisi perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera di Kota Pekanbaru lebih baik dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), yang juga merupakan partai politik yang memakai Islam sebagai asas partainya. Bahkan kedua partai politik tersebut dipimpin oleh ketua partai yang cukup terkenal yaitu Hamzah Haz (PPP), Yusril Ihza Mahendra (PBB). Dan perolehan suara Partai Keadilan sejahtera juga lebih baik dari Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan (PDI-P) pimpinan Megawati Soekarno Putri yang pada Pemilu 1999 menduduki posisi ke 2 di Kota Pekanbaru, ternyata pada pemilu 2004 perolehan suaranya menurun sangat drastis, tidak lagi berada pada urutan lima besar. Untuk lebih rincinya perolehan suara partai peserta Pemilu 2004 di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut.

**Tabel I.2 : Perolehan Suara 5 Besar Partai Politik Pada Pemilihan Umum 2004
Di Kota Pekanbaru.**

No	Nama Partai	Perolehan Suara	Persentase
1	Partai Golongan Karya	66.502	25,70%
2	Partai Amanat Nasional	35.732	13,55%
3	Partai Keadilan Sejahtera	33.908	12.56%
4	Partai Demokrat	24.520	9,28%
5	Partai Persatuan Pembangunan	16.218	6,21%

Sumber : DPD PKS Pekanbaru

Pada tabel 1.2 diatas Partai Keadilan Sejahtera Memperoleh suara sebesar 33.908 atau 12.56% hal tersebut merupakan prestasi yang cemerlang. Karena sebagai partai yang baru berdiri di Kota Pekanbaru ini sudah mampu mengungguli partai-partai yang sudah senior lainnya.

Pada pemilihan umum 2009 jumlah partai politik yang terus meningkat. Pada pemilu 2004 berjumlah 24 partai politik, pada pemilu 2009 meningkat menjadi 44 partai politik. Namun Partai Keadilan Sejahtera mampu mempertahankan posisinya pada peringkat ke-3 secara umum dan peringkat 1 dari partai yang berbasis islam. Partai Keadilan Sejahtera mampu mengungguli Partai Amanat Nasional yang pada

pemilu 2004 menduduki posisi ke-2. Untuk lebih rincinya perolehan suara partai peserta Pemilu 2009 yang masuk dalam 5 besar di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3 : Perolehan Suara 5 Besar Partai Politik Pada Pemilihan Umum 2009 Di Kota Pekanbaru.

No	Nama Partai	Perolehan Suara	Persentase
1	Partai Demokrat	49.251	19.44%
2	Partai Golongan Karya	45.692	18.03%
3	Partai Keadilan Sejahtera	25.267	9.98%
4	Partai Amanat Nasional	21.281	8.40%
5	Partai Persatuan Pembangunan	13.203	5.21%

Sumber : DPD PKS Pekanbaru

Pada tabel 1.3 diatas perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera sebesar **25.267** suara walaupun jumlah suara ini menurun dari pemilu 2004 dengan perolehan suara sebesar **33.908** suara, hal tersebut dikarenakan semakin bertambahnya jumlah partai politik peserta pemilu yang pada pemilu 2004 hanya 24 partai politik kini pada pemilu 2009 menjadi 44 partai politik. Namun Partai Keadilan Sejahtera masih menduduki posisi ke-3, ini artinya Partai Keadilan Sejahtera mampu mempertahankan prestasinya, bahkan dapat mengungguli partai-partai yang berbasis Islam, seperti Partai Amanat Nasional yang pada pemilu 2004 menduduki posisi ke-2.

Dengan perolehan suara sebesar 25.267 suara Partai Keadilan Sejahtera mampu memperoleh 5 kursi. Walaupun jumlah kursinya masih dibawah Partai

Demokrat dan Partai Golkar. Namun, Partai Keadilan Sejahtera tetap bersyukur karena sebagai partai yang berasaskan Islam Partai Keadilan Sejahtera masih bisa dikatakan sukses dan masih diberi kepercayaan yang begitu besar oleh masyarakat.

Untuk lebih rincinya perolehan kursi partai politik peserta Pemilu 2009 yang masuk dalam 5 besar di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut.

**Tabel 1.4 : Perolehan Kursi 5 Besar Partai Politik Pada Pemilihan Umum 2009
Di Kota Pekanbaru.**

No	Nama Partai Politik	Perolehan Kursi
1	Partai Demokrat	9
2	Partai Golongan Karya	9
3	Partai Keadilan Sejahtera	5
4	Partai Amanat Nasional	5
5	Partai Persatuan Pembangunan	4

Sumber : DPD PKS Pekanbaru

Dari tabel 1.4 diatas perolehan kursi masih didominasi oleh Partai Demokrat dan Partai Golongan Karya dengan perolehan 9 kursi, kemudian disusul oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional dengan 5 kursi dan diikuti oleh Partai Persatuan Pembangunan dengan 4 kursi.

Keberhasilan Partai Keadilan Sejahtera untuk bertahan hidup dan memperoleh dukungan suara merupakan fenomena menarik dalam bidang politik dan kepartaian. Hal ini dikarenakan struktur politik yang telah mengalami perubahan

secara total namun existensi partai yang berbasis Islam ini terus menunjukkan prestasinya.

Beranjak dari uraian di ataslah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menuangkan pada sebuah tulisan ilmiah yang berjudul :

“ANALISIS STRATEGI POLITIK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DALAM MEMENANGKAN PEMILU LEGISLATIF 2009 DI KOTA PEKANBARU”

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan dan untuk memfokuskan penulisan ini, maka yang menjadi perumusan masalahnya yaitu :

“Bagaimana Strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam Memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif di Kota Pekanbaru Tahun 2009”

I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Untuk menganalisa strategi apa yang telah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) gunakan untuk memenangkan Pemilihan Umum Legislatif 2009 di Kota Pekanbaru.

Manfaat Penelitian

1. Merupakan salah satu usaha untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan penulis dibidang ilmu Administrasi Negara
2. Sebagai landasan pegangan penulis dalam menerapkan ilmu-ilmu yang penulis peroleh selama dibangku perkuliahan
3. Untuk menambah referensi pustaka untuk peneliti lainnya yang berminat terhadap pembahasan yang lama dimasa yang akan datang.

I.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka penulis membagi menjadi enam bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub-sub bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori yang ada hubungannya dengan penelitian ini sehingga dapat mengemukakan suatu hipotesis serta variable.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sample dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan gambaran umum lokasi penelitian yaitu berupa sejarah partai, visi dan misi partai serta struktur organisasi partai

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan dan memeparkan tentang hasil penelitian yang penulis lakukan

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran saran yang diberikan untuk mengadakan perbaikan dalam memecahkan permasalahan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

II.1 Demokrasi

Sejarah peristilahan “demokrasi” dapat ditelusuri jauh kebelakang. Konsep ini ditumbuh kembangkan oleh negara-kota Yunani dan Athena (450 SM dan 350 SM). Dalam tahun 431 SM, seorang negarawan ternama dari Athena, mendefinisikan demokrasi dengan mengemukakan beberapa kriteria: (Roy C. Macridis.1983:19-20)

1. Pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat yang penuh dan langsung.
2. Kesamaan di depan hukum.
3. Pluralisme, yaitu penghargaan atas semua bakat, minat, keinginan dan pandangan.
4. Penghargaan terhadap suatu pemisah dan wilayah pribadi untuk memenuhi dan mengekspresikan kepribadian individual.

Robert A. Dahl dalam studinya yang terkenal mengajukan lima kriteria demokrasi sebagai sebuah ideal politik, yaitu:

1. Persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat
2. Partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif
3. Pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis
4. Kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya kekuasaan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat
5. Terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum, pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses formulasi kebijakan dan pengawasan kekuasaan.

Masih dalam kerangka pendefinisian yang bersifat umum dan menyeluruh, Amien Rais memaparkan adanya sepuluh kriteria demokrasi, yaitu: (Amien Rais.1986:Xvi-xxv)

1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan
2. Persamaan di depan hukum
3. Distribusi pendapatan secara adil
4. Kesempatan pendidikan yang sama
5. Empat macam kebebasan, yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan persuratkabar, kebebasan berkumpul dan beragama
6. Ketersediaan dan keterbukaan informasi
7. Megindahkan fatsoen politik (tatakrama politik)
8. Kebebasan individu
9. Semangat kerjasama
10. Hak untuk protes

Defenisi demokrasi banyak mengandung berbagai pengertian, menurut **Joseph Schumpeter** dalam bukunya, *Capitalism, Sosialism and Democracy* menyebutkan bahwa metode demokrasi adalah suatu perencanaan instutisional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

Ukuran demokrasi yang paling jelas ialah hak pilih universal: hak setiap warga negara untuk memilih. Dalam suatu demokrasi, pemungutan suara warga negara untuk memilih wakil-wakil distrukturkan oleh sebuah sistem partai politik. Sistem partai bisa dicirikan oleh sejumlah partai besar yang diwakili dalam badan pembuat undang-undang nasional. Apabila hanya ada satu partai politik, seperti dalam hal Uni Soviet, jelaslah tidak ada demokrasi.

Sistem partai dalam pemerintahan demokrasi pada dasarnya adalah sistem dua partai atau sistem multi partai. Dalam hal sistem multi partai, biasanya ada satu partai dominan yang memerintah secara koalisi dengan partai-partai lain atau partai dominan itu sendiri yang memerintah dalam waktu lama. Jadi, untuk memberi ekspresi yang bermakna bagi hak pilih universal dalam konteks pemerintahan perwakilan, warga negara harus mampu ikut serta dalam pemilihan kompetitif, yang pilihan pribadi dan kebijaksanaan distrukturkan oleh persaingan dua atau lebih partai politik.

Suatu cara yang baik untuk mengenal dan memahami demokrasi dengan mencoba mengidentifikasi pengertian yang pokok dan mencoba memberikan spesifikasi dari pengertian tersebut. Dengan cara demikian dicoba dicari batasan yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang menamakan dirinya demokrasi tersebut. Walaupun telah dicoba memberikan rumusan dan batasan, bukanlah berarti bahwa batasan atau rumusan itu sesuai dengan keinginan semua pihak lalu mengklaim bahwa batasan itu satu-satunya yang terbaik. Namun demikian dengan memberikan batasan yang objektif akan bisa mengurangi kesimpangsiuran pelaksanaan demokrasi. Berdasarkan batasan itu kemudian operasionalisasi demokrasi diwujudkan dengan sejujurnya dan konsekuen. Pelaksanaan demokrasi yang jujur dan konsekuen hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang terdidik dan bermoral.

Demokrasi tampaknya tidak bisa dipisahkan dari pembahasan hal-hal yang berkaitan dengan tata pemerintahan dan kegiatan politik semua proses politik dan lembaga-lembaga pemerintahan berjalan seiring dengan jalannya demokrasi.

II.2 Partai Politik

II.2.1. Pengertian Partai Politik

Secara sederhana partai politik dapat diartikan sebagai perkumpulan (segolongan orang-orang) yang seases, sehaluan, setuju (terutama dibidang politik). (Kamus Besar Bahasa Indonesia: 649). Namun secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. (Miriam Budiarjo,2003:160-161)

Apabila membicarakan partai politik, demikian **Lapalombara dan Weiner** maka yang dimaksudkan bukan organisasi politik yang mempunyai hubungan terbatas dan kadang-kadang saja dengan para pendukungnya di daerah-daerah. Namun yang dimaksudkan dengan partai politik ialah organisasi yang mempunyai kegiatan-kegiatan yang berkesinambungan artinya masa hidupnya tak tergantung pada masa jabatan atau masa hidupnya para pemimpin. Organisasi yang terbuka dan permanen tidak hanya ditingkat pusat, tetapi juga ditingkat lokal. (Ramlan Surbakti,1992:114)

Menurut beberapa ahli dikemukakan defenisi partai politik (parpol) sebagai berikut :

1. Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan

memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka. **(Roger Soltau 1961:103)**

2. Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiiil maupun materiil. **(Carl Friedrich 1967:103)**
3. Partai politik adalah organisasi dari aktifis-aktifis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda. **(Sigmund Neuman 1963:103)**
4. Partai paolitik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politikdan berebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. **(Miriam Budiarmo 1993: 103)**
5. Partai politik adalah sekelompok orang-orang yang memiliki idiologi sama, berniat merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan tujuan untuk (yang menurut pendapat mereka pribadi paling idealis) memperjuangkan kebenaran, dalam suatu level tingkat negara. **(Inu Kencana 2006:104)**

II.2.2 Tujuan Partai Politik

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Pasal 10 dinyatakan bahwa ada dua tujuan dari partai politik. Yaitu **(Hafied Cangara 2009:213) :**

1. Tujuan umum partai politik adalah:
 - a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
- d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Tujuan khusus partai politik adalah

- a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintah.
- b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

II.2.3 Fungsi, Hak dan Kewajiban Partai Politik

Sebuah partai politik berbeda dengan kelompok kepentingan (*interest group*) yang berusaha memberi pengaruh terhadap kebijakan tertentu. Akan tetapi, sebuah partai politik memiliki tujuan dan cita-cita, tidak hanya memengaruhi kebijakan publik secara luas, namun juga mengarahkan dan mengendalikan kebijakan-kebijakan itu melalui orang-orangnya yang ditempatkan pada jabatan publik. Misalnya kementerian, direktur jenderal atau direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebuah partai politik idealnya memiliki fungsi tertentu dalam sebuah pemerintahan yang bersifat demokratis.

Di Indonesia mengenai fungsi, hak dan kewajiban partai politik telah diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2008, Pasal 12 dan 13 sebagai berikut (**Hafied Cangara 2009:214-215**):

1. Fungsi partai politik (Pasal 12) yakni menjadi sarana untuk :
 - a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - b. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.
 - c. Penyerapan, penghimpunan dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
 - d. Partisipasi politik warga negara Indonesia, dan
 - e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memerhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
2. Berdasarkan (Pasal 12) partai politik berhak :
 - a. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari negara.
 - b. Mengatur dan mengurus rumah rumah tangga organisasi secara mandiri.

- c. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang dan tanda gambar partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil epala Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- e. Membentuk fraksi di tingkat DPR, DPRD Provinsi, DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan DPR dan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Mengusulkan pemberhentian antar waktu anggotanya di DPR dan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil wwali Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik, dan
- j. Memperoleh bantuan keuangan dari APBN/APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban partai politik (Pasal 13)

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Memelihara dan mempertahankan keutuhan NKRI
- c. Berpartisipasi dalam pembangunan nasional
- d. Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi dan hak asasi manusia.
- e. Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik.
- f. Menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum.
- g. Melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota.
- h. Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima serta terbuka kepada masyarakat.
- i. Membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN dan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- j. Memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum, dan
- k. Mensosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.

II.3 Teori Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani “strategos” (strator yang berarti militer dan Ag yang berarti memimpin) yang berarti “generalship” atau sesuatu yang dikerjakan oleh jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan peperangan. (Z. Helfin Frinces, 2007:79) Jika diartikan secara umum strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai tujuan khusus (Kamus Besar Bahasa Indonesia:859) Dengan demikian dapat diketahui bahwa kata “strategi” pertama kali digunakan oleh militer yang kemudian diadopsi oleh cabang ilmu lainya seperi ekonomi, sosial dan politik. Sedangkan strategi dari segi politik dapat diartikan sebagai penggunaan sumber-sumber nasional untuk mencapai tujuan nasional. (Christenses,1996:7)

Dapat dijelaskan bahwa strategi yang baik akan membawa manfaat. Adapun manfaat strategi itu antara lain adalah (**Tedjo Tripomo 2005:20**) :

1. Mendorong pemahaman terhadap situasi
2. Mengatasi konflik karena arah pengembangan yang jelas
3. Pendayagunaan dan alokasi sumber daya terbatas
4. Memenangkan kompetisi
5. Mencapai keinginan dan memecahkan masalah.

Salah satu esensi dari makna kata “strategi” adalah didalamnya terkandung berbagai konsepsi atau perencanaan bagaimana suatu tujuan dapat terealisasi. Dengan kata lain, strategi mengandung makna bahwa didalamnya termaktub cara yang paling ampuh atau tepat untuk melaksanakan rencana kerja (pribadi/organisasi) sehingga target yang diinginkan dapat tercapai. Permasalahan yang sering menjadi isu besar dalam perspektif akademik dan intelektual bahwa keberhasilan dari sebuah strategi

adalah ketepatan dalam membuat sebuah perencanaan strategis dan perencanaan ini pada gilirannya akan menentukan perubahan-perubahan yang harus dilakukan dalam usaha mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Disini dapat dinyatakan bahwa inti dari perencanaan adalah merumuskan sebuah strategi. Perencanaan yang benar dan tepat harus dapat memotivasi untuk melakukan berbagai perubahan agar tujuan dapat tercapai. Ini berarti bahwa strategi mempunyai peran yang sangat vital dalam mengarahkan berbagai perubahan yang harus dilakukan. Dengan demikian dapat dilihat bahwa strategi mempunyai pengaruh sangat besar dalam keberhasilan sebuah perencanaan dan sekaligus sangat berpengaruh dalam menentukan arah perubahan yang akan dilakukan. (Z. Helfin Frinces,2007:76-79).

II.4 Strategi Politik Dalam Memenangkan Pemilu

Meningkatnya aktivitas politik menjelang pemilihan umum dalam hubungannya penegakan demokrasi dan hak-hak asasi manusia, harus dibarengi dengan aktivitas riset atau penelitian. Riset dan penelitian dimaksudkan sebagai proses untuk menghasilkan pengetahuan baru yang lebih terstruktur, terorganisasi, sistematis dengan tingkat validitas yang lebih tinggi. Dengan hasil yang lebih terukur dibandingkan dengan cara-cara konvensional, potensi membuat kesalahan lebih kecil kemungkinannya.

Keberadaan unit riset sangat diperlukan untuk mengumpulkan data atau informasi yang dapat dimanfaatkan untuk:

1. Pengambilan keputusan, dalam penyusunan rencana atau revisi program yang telah berjalan.
2. Menentukan kebijakan dan strategi yang akan diambil.
3. Memenuhi kebutuhan khalayak atau pasar.
4. Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program.
5. Pengembangan institusi.

Mengenai riset dibidang komunikasi politik sebenarnya baru dikenal di Indonesia pada tahun 2003, sejalan dengan gerakan reformasi demokrasi untuk mengubah sistem pemilihan presiden dan anggota Dewan Perwakilan rakyat dari sistem perwakilan menjadi pemilihan langsung. Sebelumnya Partai Golkar sudah melakukannya, terutama dalam membaca target khalayak yang menjadi sasaran pemilu, meski hal ini dilakukan secara tidak terang-terangan. Beda dengan negara-negara yang sudah lama melakukan pemilihan langsung seperti Amerika Serikat, maka aktivitas riset dibidang komunikasi politik juga sudah lama dikenal.

Riset di bidang komunikasi politik selalu digunakan oleh partai politik dalam pemilihan umum, yang mengacu pada definisi komunikasi klasik dari **Harold D. Lasswell**, yakni *who, says whats, to whom, through what channels and what effects* (**Hafied Cangara.2009:495**). Definisi ini mengandung beberapa elemen dasar yang menjadi bidang studi riset komunikasi politik.

II.4.1 *Who*

Yang menunjukkan siapa yang menjadi aktor politik atau kandidat yang akan diusung untuk maju dalam pemilihan umum. Sebagai prinsip dasar aktivitas partai yaitu memilih calon untuk duduk di parlemen, senat dan memilih calon untuk jabatan eksekutif. Didalam memilih dan menentukan calon, partai seringkali dalam posisi krusial, meski partai memiliki kewenangan terhadap hal tersebut. Dalam penentuan calon, biasanya partai melihat dari suara *polling* sejauh mana calon itu dapat diterima oleh para pemilih, serta dedikasi calon terhadap partai melalui pengabdian dan pengalaman yang diberikan kepada partai. Oleh karena itu, biasanya yang mendapat prioritas dalam pencalonan partai adalah para aktivis partai itu sendiri. Partai bisa juga mencari orang lain diluar partai lalu mencalonkannya setelah melalui konvensi. Dalam konvensi, calon teruji dari segi kemampuan argumentasinya, program yang diajukan dan besarnya dukungan yang diperoleh dari cabang atau wilayah yang akan memilihnya.

Seorang calon biasanya didasarkan atas pertimbangan ketokohan. Ketokohan itu diperoleh menurut kredibilitas, yakni sejauh mana calon yang bersangkutan memiliki reputasi. Reputasi bisa diperoleh karena adanya kompetensi dan popularitas. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah pengalaman dan dedikasi yang diberikan oleh calon terhadap partai. Misalnya telah menjadi anggota atau pengurus aktif. Dedikasi ini menjadi modal untuk melihat komitmen calon terhadap perjuangan partai. Selain itu dalam penentuan calon, biasanya partai melihat dari beberapa faktor, yaitu (**Hafied Cangara.2009:425**):

a. Faktor Psikologis

Faktor ini terkait dengan masalah internal dalam diri individu maupun dari faktor luar yang disebabkan oleh pengaruh massa. Faktor internal individu misalnya perempuan lebih mudah terkena pengaruh dibandingkan dengan laki-laki sekalipun dalam hal tertentu perempuan lebih tenang dalam menentukan pilihan. Demikian juga halnya dengan orang-orang mudah lebih senang pada informasi yang bersifat heroik dan idealis dibanding dengan orang yang berusia lebih dewasa. Oleh karena itu, dalam kampanye politik, orang-orang muda lebih cepat dibakar oleh emosi, agresif dan mudah terseret oleh gelombang kerusuhan massa.

b. Faktor Budaya, Etnis dan Kedaerahan

Di dalam komunikasi politik, faktor budaya, etnis dan kedaerahan menjadi komoditas politik yang paling cepat dan mudah dijual. Orang mudah terbakar emosinya atau muncul rasa memiliki kepada calon atau partai karena kesamaan suku, budaya dan daerah. Faktor ini banyak dipengaruhi oleh ikatan emosional yang dibangun sejak masa kanak-kanak yang hidup dikampung dengan menggunakan bahasa Ibu sehingga hubungan kekeluargaan sangat kental. Sebaliknya, orang cenderung mudah menolak juga karena faktor etnis, budaya dan kedaerahan. Ketika khalifah akan dipilih untuk melanjutkan kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. Di Madinah, terjadi gejolak dalam masyarakat dengan timbul pertentangan antara penduduk Anshar (penduduk

asli Madinah) dengan para Mujahirin (pendatang dari Mekkah). Jadi, konflik kepentingan seperti ini sudah berlangsung lama.

Karena sikap fanatisme yang kuat pada etnis, budaya dan daerah, tidak heran jika ada daerah tertentu yang tidak bisa dimasuki oleh kandidat atau partai lain. Mereka mengklaim bahwa wilayah atau kawasan itu adalah pemilih atau fans dari suatu calon tertentu. Ketika Jusuf Kalla menjadi kandidat wakil presiden yang mewakili pemilih daerah luar Jawa, orang-orang Bugis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia diyakini pasti akan memiliki Jusuf Kalla sebagai calon Wakil Presiden. Demikian pula pasangannya Susilo Bambang Yudhoyono yang berasal dari Jawa Timur diyakini banyak didukung oleh etnis Jawa terutama dari Jawa Timur. Ketika Megawati diidentikan sebagai orang yang memiliki keturunan dari Bali, Bali dinyatakan wilayah PDIP.

c. Faktor Agama

Faktor ini sangat rawan dan sensitif dalam setiap pemilu sebab selain dapat mewarnai peta politik suatu negara, juga bisa menjadi sumber isu untuk diterima tidaknya seorang kandidat. Hal ini mengemuka sejak dari dulu hingga sekarang. Di AS penganut agama Protestan umumnya adalah memilih Partai republik, sementara Katolik, Yahudi dan Muslim cenderung memberi dukungan pada Demokrat.

Di Indonesia, ketika Megawati diusung menjadi calon presiden yang akan menggantikan Abdurrahman Wahid, sejumlah fatwa keluar dari para kiyai yang mengharamkan perempuan sebagai pimpinan negara. Ketika SBY

dicalonkan jadi presiden, isterinya yang bernama Kristiani diisukan beragama Kristen. Tantangan ini tidak mudah dielakkan karena menyebar dikalangan orang muslim yang mayoritasnya sebagai pemilih. Oleh karena itu tim suksesnya SBY berusaha mengubah citra tersebut dengan meminta kepada SBY dan isterinya melakukan umrah dan tampil dalam gambar memakai kerudung. Memang dalam politik pernak-pernik nonverbal menjadi komoditas politik, para calon anggota DPR umumnya memakai songkok hitam untuk menunjuk citra dirinya sebagai orang Islam yang memperjuangkan kepentingan Islam.

d. Faktor Keluarga

Faktor ini cukup dominan dalam memberi pengaruh kepada seseorang. Dalam kasus partai politik, banyak orang yang menjadi anggota partai bukan karena pengaruh partai atau media, melainkan karena pengaruh orang tuanya yang menjadi idola dari anak-anaknya. Peranan orang tua sebagai saluran sosialisasi partai politik banyak berpengaruh terhadap pemilih, utamanya pemilih pemula. Pengaruh orang tua sebagai idola anak sangat besar sehingga keluarga menjadi *political agent*.

II.4.2 Says What

Apa yang diucapkan selama kampanye, apa tema dan isi program kampanye yang ditawarkan. Kampanye adalah aktivitas komunikasi yang ditujukan untuk memengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap dan perilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan penyebar atau pemberi informasi (**Hafied Cangara 2009:275**).

Penentuan tema kampanye merupakan suatu hal yang sangat penting. Tema diibaratkan sebuah produk yang mau dipasarkan, sehingga ia harus dikemas dengan baik. Tema menjadi penting karena dalam setiap pemilu partai selalu mengetengahkan tiga hal, yakni program, citra dan kepribadian calon yang relevan dengan tema. Tema tidak boleh ditentukan begitu saja, melainkan harus menjadi kesepakatan para pimpinan teras partai dan calon yang akan diusung. Biasanya tema dimunculkan oleh orang-orang yang memiliki daya imajinatif yang tinggi. Dengan demikian, partai harus memiliki tim ahli yang bisa memikirkan hal-hal seperti ini. Sebuah tema yang baik harus memenuhi syarat, antara lain:

- a. Pendek, padat dan mudah diingat;
- b. Segar dan aktual;
- c. Menjadi slogan yang populer
- d. Mencerminkan atau mewarnai program yang akan dilaksanakan;
- e. Menarik perhatian khalayak dan menjadi motivasi para pengurus dan anggota partai;
- f. Menjadi fokus perjuangan partai.

Tema harus dikemas dengan baik agar bisa menarik perhatian, sekaligus menjadi *icon* partai. Hal ini penting karena banyak isu yang diangkat secara nasional, tetapi tidak dikemas dengan baik sehingga tidak mendapat perhatian dari masyarakat.

Dari berbagai jejak pendapat (*polling*) yang pernah dilakukan menjelang pemilu presiden, tema-tema yang banyak mendapat perhatian oleh masyarakat berkisar pada isu: sukseksi, lapangan kerja, korupsi, keadilan sosial dan pembangunan ekonomi. Begitu pentingnya masalah ekonomi sehingga bisa dikatakan masyarakat memandang pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas.

Seperti halnya Bill Clinton (47 tahun), gubernur negara bagian Arkansas yang diusung Partai Demokrat yang menantang Presiden George W. Bush dari Partai Republik. Clinton mengambil tema kampanye dengan tiga kata, yakni: “*Hope, Change and Unity*”.

a. *Hope* (Harapan)

Dalam berbagai pidato kampanyenya, Clinton menekankan Amerika adalah negarayang menjanjikan penuh harapan. Oleh karena itu, semua pemilih menurut Clinton penting memiliki harapan.

b. *Change* (Perubahan)

Clinton menginginkan adanya perubahan secara menyeluruh pada birokrasi dan ekonomi. Menurutnya perubahan adalah suatu hal yang tidak mudah dan tidak bisa dilakukan dalam semalam.

c. *Unity* (Persatuan)

Dalam kampanye yang menekankan persatuan, Clinton mengatakan naik dan turun dimana saja kita harus bersama-sama. Jika kita saling mendukung berarti kita bersama-sama akan mendukung Amerika maju kedepan.

Disamping itu, kampanye untuk pemasaran politik sangatlah penting. Dalam melakukan kampanye untuk pemasaran politik dibagi lagi menjadi beberapa bagian, seperti : pemasaran politik, tim sukses pemasaran politik, propaganda, perang urat saraf, iklan politik, kampanye hitam (*Black Campaign*), humor politik serta politis, artis dan selebritis (**Hafied Cangara 2009:275-370**).

a. Pemasaran Politik

Pemasaran politik dimaksudkan adalah penyebarluasan informasi tentang kandidat, partai dan program yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang ditujukan melalui sekmen tertentu dengan tujuan mengubah wawasan, pengetahuan, sikap dan perilaku para calon pemilih sesuai dengan keinginan pemberi informasi.

Proses pemasaran harus digerakkan oleh empat elemen utama, yakni produk, tempat, harga dan promosi.

b. Tim sukses Pemasaran Politik

Sebuah kegiatan pemasaran politik sedapat mungkin diawali dengan kegiatan pembentukan tim kerja yang biasa disebut "*Tim Sukses*". Tim sukses direkrut dari tenaga-tenaga potensial sesuai tugas dan fungsinya. Sebuah tim sukses biasanya terdiri dari penasihat, tim ahli, tim riset dan litbang, tim pengumpul dana,

tim kampanye, tim penggalang massa, tim hubungan antar daerah, tim pengamat, serta tim pengumpul suara.

c. Propaganda

Propaganda adalah suatu kegiatan komunikasi yang erat kaitannya dengan persuasi. Sekarang propaganda bertebaran dimana-mana sehingga orang dengan mudah terkecoh mulai dari model propaganda komersial sampai pada propaganda politik.

d. Perang Urat Saraf

Kegiatan yang erat hubungannya dengan usaha memengaruhi pendapat umum ialah perang urat saraf atau biasa juga disebut perang psikologi. Bahkan perang urat saraf diartikan sebagai bentuk propaganda yang menggunakan prinsip-prinsip psikologi untuk memengaruhi, mengelirukan dan membangkitkan semangat untuk menjatuhkan lawan.

e. Iklan Politik

Robert Baukus dalam Combs dalam Hafied Cangara (2009) membagi iklan politik atas empat macam, yakni :

1. Iklan serangan, yakni ditujukan untuk mendiskreditkan lawan;
2. Iklan argumen, yang memperlihatkan kemampuan para kandidat untuk mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi;
3. Iklan ID, yang memberi pemahaman mengenai siapa sang kandidat kepada para pemilih;

4. Iklan Resolusi, dimana para kandidat menyimpulkan pemikiran mereka untuk para pemilih.

f. Kampanye Hitam (*Black Campaign*)

Kampanye hitam cenderung menyudutkan para calon yang diusung untuk menduduki suatu jabatan. Isu itu biasanya erat kaitannya dengan apa yang disebut “3 Ta” yaitu: harta, wanita dan tahta. Harta biasanya diisukan dalam bentuk korupsi, wanita dalam bentuk isteri simpanan atau perselingkuhan, sedangkan tahtang dianggap sebagai sikap ambisius.

g. Humor Politik

Humor politik yang berkembang dikalangan masyarakat, terutama ditingkat masyarakat kelas menengah dan kebawah menjadi humor politik yang mengasikan untuk diperguncingkan, sekalipun hal itu mungkin saja tidak memengaruhi perolehan suara.

h. Politisi, Artis dan Selebritis

Politisi memerlukan artis dalam menggalang massa dialun-alun atau tempat terbuka. Massa senang sekali mendengar nyanyian dari para artis, apalagi yang datang selebritis sehingga mereka sering kehilangan kendali, terbawa pengaruh lagu dan musik.

II.4.3 *To Whom*

Kepada siapa-siapa yang menjadi target kampanye, bagaimana bentuk khalayak yang dihadapi, apakah potensi atau tidak, bagaimana soio-demografik mereka, apakah mereka tergolong massa yang kritis atau massa yang biasa saja.

Ole karena itu, untuk melaksanakan kampanye, diperlukan personel yang handal dan memahami tugas-tugas kampanye. Personel kampanye sebenarnya merupakan bagian dari tim sukses, bahkan bisa dikatakan semua tim sukses harus berfungsi sebagai tim kampanye. Oleh karena itu, antara tim sukses dan tim kampanye sangat sulit dibedakan. Hanya saja tim kampanye memiliki tugas yang beda satu sama lain.

II.4.4 *Through What Channels*

Tentang saluran atau media apa yang mereka gunakan dalam penyampaian program kampanye. Menjelang pemilu, masyarakat dibombardir informasi politik melalui berbagai macam media promosi, mulai TV, radio, surat kabar, tabloid, majalah dan yang lainnya. Meski pada walnya ada kesanksian bahwa penggunaan media massa sebagai alat kampanye kurang berpengaruh terhadap pemilih, memasuki tahun 1950-an, dugaan itu mulai ditinggalkan. Truman yang menjadi calon Presiden AS tahun 1948, memerlukan tiga bulan berkeliling Amerika hanya untuk berjabat tangan 500 ribu orang. Namun, ketika televisi muncul tahun 1950-an Jenderal Eisenhower hanya memerlukan 1-2 jam duduk di depan kamera untuk bertemu dan mengajak jutaan penduduk Amerika agar menggunakan hak pilihnya dalam pemilu

presiden. Para politisi melihat bahwa televisi merupakan alat yang terbaik untuk menyampaikan pesan-pesan kampanye politik.

Surat kabar memiliki kemampuan analisis yang tajam terhadap hal-hal yang bisa terjadi dari perilaku politik suatu partai atau kandidat sehingga dalam setiap pemilu apakah itu pemilu legislatif yang digunakan lima tahun sekali atau pemilu presiden dan wakil presiden.

Kepercayaan akan keperkasaan media yang mampu memengaruhi pemilih, dibuktikan dalam debat presiden antara Richard Nixon dan John F. Kennedy pada tahun 1960, dan juga keberhasilan Clinton menggalang media lokal selama kampanye. Ia mampu menarik suara dari Partai Republik ke Partai Demokrat dengan menggaet pendukung Bush sebanyak 29,28 persen.

Faktor yang diharapkan dari pengaruh media adalah upaya untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Hal ini bisa dilakukan melalui sosialisasi program para kandidat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih.

II.4.5 *And What Effects*

Dan apa pengaruh dari kampanye yang bisa diperoleh. Efektivitas sebuah kampanye hanya bisa diketahui dengan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan dua cara, yakni:

1. Evaluasi Program

Evaluasi program bisa disebut evaluasi summatif. Evaluasi ini memiliki fokus antara lain.

- a. Untuk melihat sejauh mana tujuan akhir yang ingin dicapai (*goal*) dari suatu kegiatan, apakah terpenuhi atau tidak.
- b. Untuk melakukan modifikasi tujuan program dan strategi.

2. Evaluasi Manajemen

Evaluasi manajemen bisa disebut evaluasi formatif. Evaluasi ini memiliki fokus terhadap pencapaian operasional kegiatan berikut.

- a. Apakah hal-hal yang dilakukan masih dalam tataran rencana yang telah ditetapkan semula?
- b. Apakah pelaksanaan kegiatan berjalan lancar atau tidak?
- c. Apakah usaha yang dilakukan itu mengalami kemajuan atau tidak?
- d. Apakah ada hambatan atau kemacetan yang ditemui dalam operasional atau tidak?
- e. Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut, apakah dengan cara modifikasi langkah-langkah yang akan diambil atau menambah komponen yang bisa memperlancar jalannya kegiatan?

Evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan cara uji awal (*pretesting*) dan uji akhir (*pos-testing*). Uji awal biasanya dilakukan untuk mengetahui apakah pesan-pesan komunikasi yang akan disampaikan sudah sesuai dengan

kebutuhan target sasaran. Sedangkan uji akhir dilakukan untuk melihat hasil proses komunikasi yang telah dilaksanakan, apakah cukup efektif sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

II.5 Konsep Operasional

Ukuran demokrasi yang paling jelas ialah hak pilih universal: hak setiap warga negara untuk memilih. Dalam suatu demokrasi, pemungutan suara warga negara untuk memilih wakil-wakil distrukturkan oleh sebuah sistem partai politik.

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. (Miriam Budiarjo,2003:160-161)

Meningkatnya aktivitas politik menjelang pemilihan umum dalam hubungannya penegakan demokrasi dan hak-hak asasi manusia, harus dibarengi dengan aktivitas riset atau penelitian. Riset dan penelitian dimaksudkan sebagai proses untuk menghasilkan pengetahuan baru yang lebih terstruktur, terorganisasi, sistematis dengan tingkat validitas yang lebih tinggi. Dengan hasil yang lebih terukur dibandingkan dengan cara-cara konvensional, potensi membuat kesalahan lebih kecil kemungkinannya.

Riset di bidang komunikasi politik selalu digunakan oleh partai politik dalam pemilihan umum, yang mengacu pada defenisi komunikasi klasik dari **Harold D.**

Lasswell, yakni *who, says whats, to whom, through what channels and what effects* (**Hafied Cangara.2009:495**). Defenisi ini mengandung beberapa elemen dasar yang menjadi bidang studi riset komunikasi politik.

II.5.1 Who

Yang menunjukkan siapa yang menjadi aktor politik atau kandidat yang akan diusung untuk maju dalam pemilihan umum. Sebagai prinsip dasar aktivitas partai yaitu memilih calon untuk duduk di parlemen, senat dan memilih calon untuk jabatan eksekutif.

II.5.2 Says What

Apa yang diucapkan selama kampanye, apa tema dan isi program kampanye yang ditawarkan. Penentuan tema kampanye merupakan suatu hal yang sangat penting. Tema diibaratkan sebuah produk yang mau dipasarkan, sehingga ia harus dikemas dengan baik.

II.5.3 To Whom

Kepada siapa-siapa yang menjadi target kampanye, bagaimana bentuk khalayak yang dihadapi, apakah potensi atau tidak, bagaimana soio-demografik mereka, apakah mereka tergolong massa yang kritis atau massa yang biasa saja.

II.5.4 Through What Channels

Tentang saluran atau media apa yang mereka gunakan dalam penyampaian program kampanye. Menjelang pemilu, masyarakat dibombardir informasi politik melalui berbagai macam media promosi, mulai TV, radio, surat kabar, tabloid, majalah dan yang lainnya.

II.5.5 *And What Effects*

Dan apa pengaruh dari kampanye yang bisa diperoleh. Efektivitas sebuah kampanye hanya bisa diketahui dengan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan dua cara, yakni:

1. Evaluasi Program
2. Evaluasi Manajemen

II.6 Hipotesis

Sehubungan dengan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas dengan memperhatikan telaah pustaka dan teori-teori yang ada, maka penulis dapat mengemukakan hipotesis sebagai berikut **“Diduga Strategi Berpengaruh Terhadap Pemenangan Pemilu Legislatif”**

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

III.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Sebagaimana yang termuat dalam judul, penelitian ini dilakukan pada kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan sejahtera (PKS) di Kota Pekanbaru pada bulan November 2009.

III.2 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sebagai berikut:

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh berupa informasi dan tanggapan responden dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Tentang strategi apa yang digunakan untuk memenangkan Pemilu Legislatif 2009 di Kota Pekanbaru?
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi yang dikeluarkan Partai berupa sejarah berdirinya dan laporan-laporan lainnya.

III.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, sedangkan sampel adalah bagian dari

populasi yang akan kita ambil untuk mewakili populasi secara keseluruhan yang akan dijadikan responden dalam suatu penelitian.

Populasi dari penelitian ini adalah sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera Pekanbaru, Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera Pekanbaru, dan Anggota DPRD Pks Kota Pekanbaru, untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel III.1

Tabel III.1 Jumlah Populasi dalam Penelitian

No.	Jenis Populasi	Jumlah
1	Pengurus DPD Pks Kota Pekanbaru	11
2	Anggota DPRD Pks Kota Pekanbaru	5
3	Ketua DPC Pks Se-Kota Pekanbaru	12
	Jumlah	28

Jadi, jumlah populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 28 orang, karena sedikitnya jumlah populasi maka seluruh populasi dijadikan sampel sehingga penelitian ini disebut sampel jenuh atau sensus (**Sugiyono 2004, Hal :78**)

III.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

III.4.1 Wawancara, yaitu penulis melakukan tanya jawab dengan responden untuk mendapat keterangan atau informasi yang digunakan untuk melengkapi bahan yang dianggap perlu dalam penelitian ini.

III.4.2 Kuesioner, yaitu dengan membuat daftar pertanyaan yang digunakan untuk mempermudah dalam pengumpulan data yang diperlukan dan diajukan kepada responden.

III.4.3 Observasi, yaitu penulis langsung kelapangan untuk memastikan bahwa data yang didapat benar-benar valid, yang berhubungan dengan data dan informasi yang diterima.

III.5 Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpulkan, maka data tersebut akan di kelompokkan kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif lalu disusun dan di hubungkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan strategi partai politik dalam memenangkan pemilu.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

IV.1 Sejarah Terbentuknya PKS

Dua belas tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 9 Agustus 1998, ribuan massa memadati Masjid Al-Azhar Jakarta Selatan, untuk turut menyambut deklarasi sebuah partai baru. Partai yang berlambang gambar Ka'bah dengan dua bulan sabit yang menggapit garis lurus ditengahnya itu diberi nama Partai Keadilan. Kemunculan partai tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak partai politik yang didirikan pada masa tersebut.

Kemuncula Partai Keadilan yang didirikan pada tanggal 20 Juli 1998 ternyata cukup menimbulkan keterkejutan publik Indonesia yang saat itu sedang mengalami *euphoria* politik yang luar biasa. Hal ini dikarenakan Partai Keadilan dalam mendeklarasikan partainya sangat jauh berbeda dengan partai-partai lain. Sebagaimana dilansir oleh berbagai media massa, peresmian Partai Keadilan di Jakarta saat itu dilakukan secara massal. Hadir sekitar lima puluh ribu pendukungnya, disertai dengan berbagai pertunjukan seni Islam. Selain itu, sebagian besar pendukung partai yang hadir adalah anak-anak muda dengan penampilan fisik yang sangat khas dan berbeda dari masyarakat Indonesia pada umumnya. Para pendukung dari kalangan perempuan hampir semuanya mengenakan jilbab yang panjang dan lebar, sementara kalangan pria kebanyakan mempunyai janggut. Bukan itu saja

kebanyakan dari mereka berasal dari golongan terdidik yang terdiri mahasiswa dan para intelektual muda.

Meskipun dalam konstelasi politik Indonesia Partai Keadilan dapat dimasukkan kedalam barisan partai-partai Islam yang memang marak berdiri saat itu. Namun agaknya sulit untuk mencari kesamaan antara Partai Keadilan dengan partai-partai Islam lainnya, yang umumnya memiliki keterkaitan historis dan idiologis dengan partai-partai Islam dimasa lalu. Namun demikian bukan berarti kemunculan Partai Keadilan tidak mempunyai akar historis sama sekali dengan dinamika sosial politik di Indonesia. Bahkan dalam pengakuan Nur Mahmudi Ismail (Presiden Pertama Partai Keadilan) Partai Keadilan justru mempunyai akar historis dan idiologis yang sangat panjang.

IV.2 Hubungan Partai Keadilan Dengan Partai Keadilan Sejahtera

Pasca pemilihan umum 1999, Perolehan suara Partai Keadilan yang tergolong cukup signifikan, yaitu sebanyak 1.436.565 suara atau sebesar 1.36% dari jumlah total suara, juga mampu mengantarkan Partai Keadilan sebagai tujuh partai besar (*the big seven*) pemenang pemilu. Sebagai partai baru yang belum memiliki pengalaman politik sama sekali, hal ini menjadi catatan prestasi tersendiri bagi Partai Keadilan. Terlebih lagi jumlah tersebut juga mengungguli perolehan suara beberapa partai Islam lainnya, padahal kebanyakan partai-partai Islam tersebut mengklaim sebagai pewaris partai-partai Islam dimasa lalu.

Namun demikian, meski kehadiran Partai Keadilan dinilai sangat fenomenal, baik dari segi *Performance* politik maupun perolehan suara yang cukup signifikan, Partai Keadilan dihadapkan pada realitas politik yang menghadang langkah partai tersebut untuk mengikuti pemilu 2004. ini dikarenakan perolehan suara Partai Keadilan tidak mampu menembus ketentuan batas minimal suara (*electoral threshold*) sebesar 2%, sebagaimana tercantum dalam UU No.3 Tahun 1999 mengenai Pemilu.

Karena upaya untuk merubah ketentuan Undang-Undang Pemilu gagal, maka Partai Keadilan mempersiapkan sebuah partai politik baru yang akan menjadi wadah bagi kelanjutan kiprah politik dakwah bagi masyarakat Indonesia. Yang diberi nama Partai Keadilan Sejahtera atau disingkat PK Sejahtera yang didirikan pada tanggal 20 April 2002.

Partai Keadilan Sejahtera disahkan sebagai partai politik yang berbadan hukum pada 17 Juli 2003. Pada perombakan pengurus tanggal 18 September 2003 terpilihlah Hidayat Nur Wahid sebagai Presiden partai periode 2003-2008.

IV.3 Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera

Visi Indonesia yang dicita-citakan Partai Keadilan Sejahtera adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, sejahtera dan bermartabat. Masyarakat madani adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan; menghormati

pluralitas; bersikap terbuka dan demokratis dan bergotong –royong menjaga kedaulatan Negara.

Perjuangan untuk mewujudkan masyarakat madani, baik secara structural maupun cultural, sebagai bagian dari dakwah dalam maknanya yang historic, positif dan obyektif bagi umat Islam dalam bingkai NKRI adalah bagian dari upaya merealisasikan tujuan didirikan PK Sejahtera sebagaimana dicantumkan dalam Anggaran Dasar PK Sejahtera.

Masyarakat Madani sebagai warisan sunnah Nabawiyah adalah komunitas yang hadir melalui perjuangan yang dipimpin langsung Rasulullah Saw dengan bingkai piagam Madinah. Sebagai basis lain berdirinya Masyarakat Madani, Rasulullah Saw telah menegaskan pentingnya melaksanakan nilai-nilai fundamental yang disampaikan secara terbuka, ketika pertama kali menginjak kaki di tanah Madinah sesudah hijrah dari kota Mekkah. Nilai-nilai itu bias disebut sebagai “Manifesto berdirinya Masyarakat Madani” yang antara lain menetapkan: prinsip memanusiakan manusia dan melibatkan mereka secara keseluruhan dalam risalah dakwah, apapun latar belakangnya, ajakan untuk memperluas budaya hidup yang aman dan damai, mengokohkan sikap solidaritas social dan menguatkan semangat silaturahmi serta mewujudkan manusia yang seutuhnya dengan menguatkan kedekatan kepada Allah Swt.

Selain itu Partai Keadilan Sejahtera juga memiliki visi sebagai partai dakwah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai umat dan bangsa. Visi khusus

Partai Keadilan sejahtera partai berpengaruh baik sebagai kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani.

Visi ini akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai:

- a. Partai dakwah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- b. Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam didalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa diberbagai bidang.
- c. Kekuatan yang memelopori dan menggalang kerja sama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan system Islam yang *rahmatan lil' alamin*.
- d. Akselator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.

Misi yang diemban Partai Keadilan Sejahtera adalah:

- a. Mempelopori reformasi system politik, pemerintah dan birokrasi, peradilan dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi. Mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenang setiap lembaga agar terjadi proses saling mengawasi. Melanjutkan reformasi birokrasi dan lembaga peradilan dengan memperbaiki system rekrutmen dan pemberian sanksi-penghargaan, serta penataan jumlah pegawai negeri dan memfokuskan pada posisi fungsional.
- b. Mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui strategi pemerataan pendapatan,

pertumbuhan bernilai tambah tinggi dan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan melalui langkah-langkah utama berupa pelipatgandaan produktifitas sector pertanian, kehutanan dan kelautan, peningkatan daya saing industry nasional dengan pendalaman struktur dan *upgrading* kemampuan teknologi.

- c. Menuju pendidikan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun sistem pendidikan nasional yang terpadu, komprehensif dan bermutu untuk menumbuhkan SDM yang berdaya saing tinggi serta guru yang professional dan sejahtera. Menuju sehat paripurna untuk semua kelompok warga, dengan visi sehat badan, mental spiritual dan social sehingga dapat beribadah kepada Allah SWT untuk membangun bangsa dan Negara.

IV.4 Prinsip Kebijakan Partai Keadilan sejahtera

Dalam menjalankan roda organisasi partai, Partai Keadilan Sejahtera memiliki prinsip-prinsip kebijakan yang menjadi landasan berpikir dan beraktifitas dalam mengelola partai politik. Prinsip Kebijakan Partai Keadilan Sejahtera yang diambil dari ajaran-ajaran Islam yang terdapat dalam kitab suci Al-qur'an tersebut diantaranya adalah :

- a. *Al-Syumuliyah* (Lengkap dan Integral)

Sesuai dengan karakteristik da'wah islami yang syamil, maka setiap kebijakan partai akan selalu dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai aspek,

memandangnya dari berbagai perspektif dan mensikronkan antara satu aspek dengan aspek lainnya.

b. *Al-Ishlah* (Reformatif)

Setiap kebijakan, program dan langkah yang ditempuh partai selalu berorientasi pada perbaikan (*ishlah*), baik yang berkaitan dengan perbaikan individu, masyarakat ataupun yang berkaitan dengan perbaikan pemerintah dan Negara.

c. *Al-Syar'iyah* (Konstitusional)

Syariah yang berisi hukum-hukum Allah SWT telah menetapkan hubungan pokok antara manusia terhadap Allah dan hubungan terhadap diri sendiri dan orang lain.

d. *Al-Wasathiyah* (Moderat)

Masyarakat muslim disebut sebagai masyarakat “tengah” (*ummatan wasatha*). Simbol moralitas masyarakat Islam tersebut melahirkan perilaku, sikap, watak moderat dalam sikap dan interaksi muslim dengan berbagai persoalan. Dalam tataran praktis sikap kemoderatan ini dinyatakan dalam penolakannya terhadap segala bentuk ekstremitas dan eksagritas kedzaliman dan kebathilan.

e. *Al-Istiqamah* (Komit dan Konsisten)

Ciri seorang muslim harus komit dan konsisten kepada ajaran Islam yang menjadi inspirasi setiap gerakannya. Konsekwensinya seluruh kebijakan, program dan langkah-langkah operasional partai harus *Istiqamah* pada

“hukum transenden” yang ditemukan dalam keseluruhan tata alamiah dalam keseluruhan proses sejarah.

f. *Al-Numuw wa al-Tathawwur* (Tumbuh dan Berkembang)

Konsistensi yang menjadi watak Partai Keadilan Sejahtera tidak boleh melahirkan stagnan bagi gerakan dan kehilangan kreatifitas yang orisinal. Maka prinsip tumbuh dan berkembang harus menjadi prinsip gerakan dengan tetap mengacu kepada kaidah yang bersumber dan nilai-nilai Islam.

g. *Al-Tadarruj wa Al-Tawazun* (Bertahap, Seimbang dan Proporsional)

Pertumbuhan dan perkembangan gerakan da'wah partai mesti dilalui secara terhadap dan proporsional, sesuai dengan *sunnatullah* yang berlaku di jagat raya ini

h. *Al-Awlawiyat wa Al-Maslahah* (Skala Prioritas dan Prioritas Kemanfaatan)

Efektifitas sebuah gerakan salah satunya ditentukan oleh kemampuan gerakan tersebut dalam menentukan prioritas langkah dan kebijakannya. Prinsip ini dapat melahirkan efektifitas dan efisiensi gerakan.

i. *Al-Hulul* (Solusi)

Sesuai dengan namanya, Partai Keadilan Sejahtera memperjuangkan aspek-aspek yang tidak hanya berhenti pada janji, teori maupun kegiatan yang dirasakan manfaatnya oleh umat.

j. *Al-Mustaqbaliyah* (Orientasi Masa Depan)

Disadari, sasaran da'wah yang akan diwujudkan merupakan sasaran besar, yaitu tegaknya agama Allah di bumi yang menyebarluaskan keadilan dan

kesejahteraan bagi seluruh ummat manusia, sehingga bias jadi yang akan menikmati keberhasilannya adalah generasi mendatang.

k. *Al-'Alamiyah* (Bagian dari Da'wah Sedunia)

Pada hakikatnya gerakan da'wah islamiyah, baik tujuan atau sasaran yang akan dicapai bersifat mendunia sejalan dengan universitas Islam. Ia merupakan aktivitas yang tidak kenal batas etnisitas, Negara atau daerah tertentu.

IV.5 Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru

Proses kelahiran Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru merupakan tindak lanjut dari proses regenerasi dan restrukturisasi Partai Keadilan menjadi Partai Keadilan Sejahtera ditingkat pusat dan tingkat wilayah atau provinsi. Penetapan DPD Kota Pekanbaru dilaksanakan pada tanggal 26 Jumaidil Akhir 1424 H atau bertepatan dengan tanggal 25 Agustus 2003 M melalui **Surat Keputusan Partai Keadilan Sejahtera Propinsi Riau nomor : 30/SKEP/AD-PKS/VI/1424 Tentang Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru.** Surat keputusan ini sangat penting artinya demi kebersamaan dan mengakomodir kepentingan antara dua partai yaitu Partai Keadilan dengan Partai Keadilan sejahtera pasca penggabungan. Sehingga diperlukan struktur organisasi partai yang baru dengan mempertimbangkan dan melibatkan unsure Partai Keadilan dan Partai Keadilan Sejahtera.

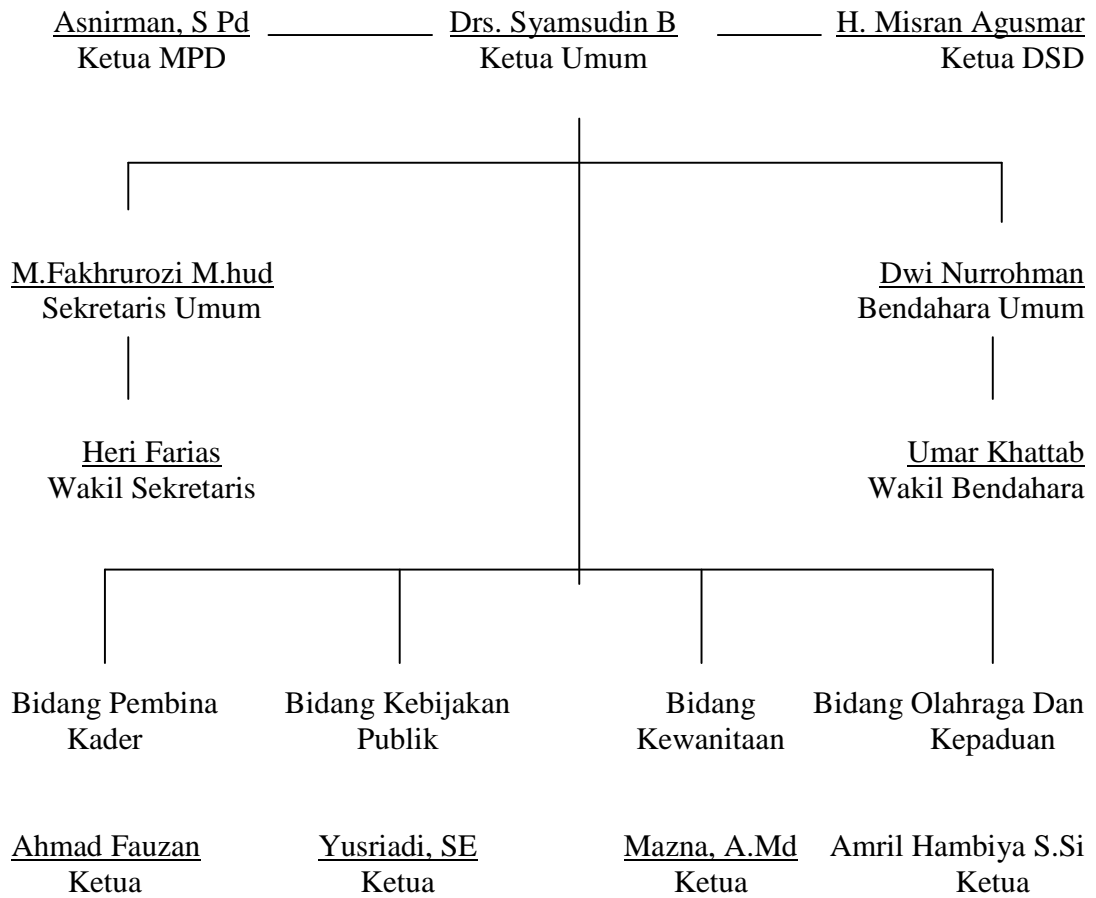
IV.5.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera struktur organisasi terdiri dari :

- a. Struktur Organisasi Tingkat Pusat meliputi Majelis Syuro, Majelis Pertimbangan, Dewan Syari'ah, Dewan Pimpinan Pusat dan Lembaga Kelengkapan Partai.
- b. Struktur Organisasi Tingkat Wilayah yang berkedudukan di Provinsi. Terdiri dari Dewan Syari'ah Wilayah dan Dewan Pimpinan Wilayah.
- c. Dewan Pimpinan Daerah yang berada di Kabupaten/Kotamadya.
- d. Dewan Pimpinan Cabang yang berada di Kecamatan.
- e. Dewan Pimpinan Ranting yang Berada di tingkat Desa.

Untuk lebih melengkapi tulisan ini, maka penulis akan kemukakan struktur organisasi kepengurusan Dewan Pimpinan daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru.

**STRUKTUR ORGANISASI KEPENGURUSAN
DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PEKANBARU**



Sumber : DPD PKS Pekanbaru

IV.5.2 Tugas DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru

Kemudian untuk menjalankan roda organisasinya, Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kota Pekanbaru memiliki tugas-tugas yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera, diantaranya adalah :

- a. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Musyawarah Daerah (MUSDA) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).
- b. Menyusun program dan anggaran tahunan untuk Dewan Pimpinan Daerah dan lembaga-lembaga structural dibawahnya kemudian mengajukan kepada Dewan Pimpinan Wilayah.
- c. Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga structural dibawahnya.
- d. Menyusun siding-sidang Musyawarah Daerah sesuai dengan ketentuan yang terkait dengan hal tersebut.
- e. Menyusun laporan keuangan dan evaluasi akhir serta mengajukan kepada forum Musyawarah Daerah (MUSDA) Partai keadilan Sejahtera.
- f. Mengajukan Laporan kerja secara terperinci setiap tiga bulan kepada Dewan Pimpinan Wilayah.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

V.1 Identitas Responden

Untuk melanjutkan pembahasan mengenai strategi politik Partai Keadilan Sejahtera dalam memenangkan pemilu legislatif terlebih dahulu penulis tetapkan beberapa identitas responden dari data yang diperoleh dari kuesioner tersebut, di bawah ini disajikan data dalam tabel distribusi yang akan dijelaskan satu persatu.

Identitas yang ditentukan untuk memberikan gambaran tentang signifikan antara data responden dengan analisis yang dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian yang dikaji. Beberapa identitas Responden yaitu:

V.1.1 Jenjang Pendidikan

Sepanjang sejarah perkembangan dunia yang bersifat dinamis ini, faktor pendidikan menjadi kemutlakan yang harus diperhatikan dengan seksama oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenal usia. Artinya tuntutan akan pendidikan terus mengitari siklus kehidupan manusia, bahkan pendidikan senantiasa menempati posisi teratas dalam kriteria pencapaian suatu kualitas dan produktivitas yang baik.

Pendidikan merupakan segala usaha untuk membina kepribadian dan mengembangkan kemampuan manusia, baik jasmani maupun naluri yang berlangsung seumur hidup, baik dijalur formal maupun informal dalam

mengembangkan pembangunan sumber daya manusia.

Table V.1 Jawaban Responden Tentang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tamatan SLTA	7	25
2	Perguruan tinggi	21	75
Jumlah		28	100

Sumber: hasil Penelitian Lapangan: Tahun 2010

Tabel V.1 di atas memperlihatkan tingkat pendidikan responden penelitian, yakni terdapat 7 responden (25 %) yang berbekal pendidikan SLTA, dan selebihnya 21 responden (75 %) yang sudah mencapai jenjang pendidikan tinggi yaitu sarjana dan Diploma.

V.1.2 Jabatan

Disamping tingkat pendidikan tersebut, identifikasi responden penelitian dapat ditinjau dari kedudukan jabatan seseorang yang merupakan faktor yang turut mempengaruhi cara berfikir dan bertindak seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Tabel V.2 Penempatan kedudukan dalam struktur organisasi PKS

No	Kedudukan	Jumlah	Persentase
1	Pengurus DPD	11	39
2	Anggota DPRD PKS	5	18
3	DPC PKS	12	43
Jumlah		28	100

Sumber DPD PKS Pekanbaru 2010

Dari table diatas dapat dilihat penempatan kedudukan seseorang diantaranya terdapat 11 orang (39%) sebagai Pengurus DPD, 5 orang (18) yang menjadi anggota DPRD Kota Pekanbaru dan 12 orang (43) Ketua DPC PKS di Kota Pekanbaru.

V.1.3 Umur

Identifikasi responden penelitian dapat ditinjau dari tingkat umur yang dimiliki karena konsepsi umur merupakan faktor yang turut mempengaruhi cara berfikir dan bertindak seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehari-hari berdasarkan kematangan dan pengalaman yang telah di jalani selama ini.

Berikut adalah keadaan umur respon dapat dilihat pada table V.3 berikut:

Tabel. V.3 Keadaan Umur Respon Penelitian

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	25-35	8	29
2	36-45	13	46
3	46-55	7	25
Jumlah		28	100

Sumber : Data Dari DPD PKS Pekanbaru 2010

Tabel V.3 di atas memperlihatkan kelompok umur responden penelitian, yakni terdapat 8 responden (29%) yang berumur 25-35 tahun, kemudian terdapat pula 13 responden (46%) yang berumur 36-45 tahun, sebanyak 7 responden (25%) berumur 46-55 tahun.

V.2 Strategi PKS dalam Memenangkan Pemilu Legislatif di Kota Pekanbaru Tahun 2009

V.2.1 Strategi dalam Memilih Calon Yang Akan Diusung Dalam Pemilu

Didalam memilih dan menentukan calon Partai Keadilan Sejahtera memiliki kewenangan terhadap hal tersebut. Faktor yang terpenting dalam memilih calon adalah pengalaman dan dedikasi yang diberikan oleh calon terhadap partai. Misalnya telah menjadi anggota atau pengurus aktif. Dedikasi ini menjadi modal untuk melihat komitmen calon terhadap perjuangan partai.

Dalam anggaran rumah tangga PKS pada BAB XI Pasal 40 dinyatakan tentang Kepengurusan Majelis Pertimbangan Daerah dinyatakan prasaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Majelis Pertimbangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Sekurang-kurangnya Anggota dewasa dengan masa keanggotaan sekurang-kurangnya dua tahun
2. Pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai sekurang-kurangnya di Dewan Pengurus Cabang.
3. Berpegang dan komitmen kepada hukum Islam, nilai-nilai moral dan kebenaran universal, adil, bertaqwa, sabar, jujur dan bijaksana.
4. Memiliki pengetahuan kewilayahan, manajemen dan keorganisasian.
5. Menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas Majelis Pertimbangan Daerah.

V.2.2 Memilih Calon Diutamakan Para Aktivistis Partai

Dalam menentukan calon yang akan diusung pada pemilihan umum, partai memiliki kewenangan terhadap hal tersebut. Biasanya partai melihat dari suara *polling* sejauh mana calon itu dapat diterima oleh para pemilih, bagi Partai Keadilan Sejahtera Pekanbaru dalam memilih calon yang akan diusung dalam pemilihan umum partai lebih mengutamakan memilih para aktivis yang ada di partai tersebut, karena partai sudah melihat dedikasi dan pengabdian calon. Selain itu, mengutamakan para aktivis partai diharapkan dapat mengangkat nama baik partai.

Hasil penelitian terhadap memilih calon dari aktivis partai oleh Partai Keadilan Sejahtera dapat dilihat dari table berikut ini.

Tabel V.4 Tanggapan responden mengenai memilih calon dari aktivis partai

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sering	18	64
2	Kadang-kadang	8	29
3	Tidak pernah	2	7
Jumlah		28	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2010

Tabel diatas memperlihatkan bahwa 18 orang atau sekitar 64% responden menyatakan partai lebih sering memilih calon dari aktivis partai. 8 orang atau sekitar 29% menjawab kadang-kadang, dan hanya 2 orang atau sekitar 7% menyatakan tidak pernah melaksanakan.

Data diatas menunjukkan bahwa partai lebih mengutamakan memilih calon dari aktivis partai dari pada mencari orang lain diluar partai lalu dicalonkan. Hal ini terlihat dari 28 orang respon, terdapat 18 responden atau 64% yang menyatakan lebih sering memilih calon dari aktivis partai. Hal ini dilakukan karena Partai Keadilan sejahtera menyadari memilih calon dari aktivis partai merupakan salah satu strategi dalam memenangkan pemilihan umum. Berikut ini hasil penelitian tentang

V.2.3 Calon Yang Diusung Harus Mampu Mengangkat Nama Baik Partai

Salah satu factor yang membuktikan bahwa calon yang telah diusung merupakan calon yang terbaik yang dimiliki Partai. Bagi Partai Keadilan Sejahtera hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa indicator pematangan yaitu:

1. Pemahaman *filosofis* bidang profesinya
2. Pemahaman *multi* aspek pengembangan ilmunya
3. Kemampuan *lobby*
4. Pemikiran mulai mempengaruhi kebijakan nasional.

Hasil penelitian terhadap calon yang telah diusung telah berhasil mengangkat nama baik partai oleh Partai Keadilan Sejahtera dapat dilihat dari table berikut ini.

Tabel V.5 Tanggapan responden mengenai calon yang diusung telah berhasil mengangkat nama baik partai.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sering	22	79
2	Kadang-kadang	4	14
3	Tidak pernah	2	7
Jumlah		28	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2010

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah jawaban yang banyak Tentang Apakah calon yang telah diusung telah berhasil mengangkat nama baik Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 22 (79%) responden, kemudian diikuti Jawaban Kadang-kadang sebanyak 4 (14%) Responden, dan kemudian diikuti jawaban Tidak pernah sebanyak 4 (2%) Responden.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dikatakan bahwa calon yang telah diusung Partai Keadilan Sejahtera telah berhasil mengangkat nama baik partainya.

V.2.4 Menggunakan *Polling* Untuk Menentukan Calon

Strategi yang mendapat perhatian penuh dalam memenangkan pemilihan umum bagi Partai Keadilan Sejahtera adalah memilih calon yang akan diusung berdasarkan *polling* atau kriteria-kriteria tertentu. Hal ini dilakukan untuk memperoleh suara yang sebanyak mungkin. Karena, kriteria yang baik sangat menentukan apakah masyarakat ingin memilihnya ataupun tidak. Menggunakan *polling* sangat banyak manfaatnya dibandingkan calon yang akan maju dalam pemilihan umum langsung ditentukan oleh Ketua Umum Partai.

Berikut hasil penelitian tentang calon yang akan diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera lebih sering menggunakan *Polling* dibandingkan dengan calon langsung ditentukan oleh Ketua Umum Partai.

Tabel V.6 Tanggapan responden mengenai calon yang diusung lebih sering menggunakan *polling*.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sering	24	85,7
2	Kadang-kadang	3	10,7
3	Tidak pernah	1	3,6
Jumlah		28	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2010

Setelah mengamati table diatas dapat dijelaskan bahwasanya sebanyak 24 orang atau 85,7% Responden menyatakan sering, sedangkan 3 orang atau 10,7% responden menyatakan kadang-kadang dan sebanyak 1 orang atau 3,6% responden menyatakan tidak pernah.

Memang sudah seharusnya Partai menggunakan *polling* dalam menentukan calon yang akan maju dalam pemilihan umum, dari pada calon langsung ditunjuk oleh Ketua Umum Partai.

V.2.5 Menentukan Calon Mengutamakan Faktor Psikologis Dan SARA.

Sebaiknya partai harus benar-benar mempertimbangkan faktor psikologis dan SARA ini. Karena factor psikologis dan sara sangat besar pengaruhnya dalam meraih dukungan dari masyarakat.

Berikut hasil penelitian apakah calon yang diusung telah diperhatikan factor psikologis dan SARA dapat dilihat dari table berikut ini

Table V.7 Tanggapan responden apakah menentukan calon sering diperhatikan factor psikologis dan SARA.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sering	16	57
2	Kadang-kadang	7	25
3	Tidak pernah	5	18
Jumlah		28	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2010

Kita memperoleh jawaban dari table diatas behwasanya sebanyak 16 orang atau 57% responden menyatakan sering, sedangkan sebanyak 7 orang atau 25% responden menyatakan Kadang-kadang dan sebanyak 5 orang atau 18 % menyatakan tidak pernah.

Dari tabel diatas dapat dikatan sebanyak 16 orang atau 57% sering menyatakan memilih calon melihat dari faktor psikologis dan SARA, factor psikologis sangat menentukan calon yang nantinya akan mengemban tugas-tugas yang berat. Sedangkan factor SARA sangat berpengaruh dalam memperoleh simpatik masyarakat untuk memberikan suaranya.

V.2.6 Memilih Calon Diluar Anggota Partai

Untuk mengetahui apakah Partai Keadilan Sejahtera sering memilih calon diluar anggota partai dapat kita ketahui setelah kita melihat table berikut ini.

Tabel V.8 Tanggapan responden terhadap memilih calon diluar anggota partai

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sering	6	21,4
2	Kadang-kadang	13	46,4
3	Tidak pernah	9	32,2
Jumlah		28	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2010

Informasi yang dapat kita peroleh dari tabel diatas bahwasanya sebanyak 6 orang atau 21,4% responden menyatakan sering, sedangkan sebanyak 13 orang atau 46,4% responden menyatakan Kadang-kadang dan sebanyak 10 orang atau 32,2% menyatakan tidak pernah.

Berdasarkan jawaban responden, Partai Keadilan Sejahtera jarang sekali memilih calon diluar anggota partai. Calon diluar anggota partai yang berpotensi dan mempunyai banyak massa sangatlah menguntungkan partai dalam pertarungan meraih perolehan suara yang sebanyak mungkin. Jadi, seharusnya Partai Keadilan Sejahtera harus jeli memperhatikan tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai massa dan pengaruh yang besar di masyarakat.

V.3 Strategi Partai Keadilan Sejahtera Dalam Berkampanye

Aktivitas yang sering dilakukan oleh partai politik menjelang pemilihan umum adalah berkampanye, kampanye dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terhadap program partai, tujuan, visi dan misi partai serta pengenalan calon yang akan diusung dalam pemilihan umum.

Tema harus dikemas dengan baik agar bisa menarik perhatian, sekaligus menjadi *icon* partai. Hal ini penting karena banyak isu yang diangkat secara nasional, tetapi tidak dikemas dengan baik sehingga tidak mendapat perhatian dari masyarakat.

Dari berbagai jejak pendapat (*polling*) yang pernah dilakukan menjelang pemilu presiden, tema-tema yang banyak mendapat perhatian oleh masyarakat berkisar pada isu: suksesi, lapangan kerja, korupsi, keadilan sosial dan pembangunan ekonomi. Begitu pentingnya masalah ekonomi sehingga bisa dikatakan masyarakat memandang pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas.

V.3.1 Menentukan Tema Kampanye

Tema harus dikemas dengan baik agar bisa menarik perhatian, sekaligus menjadi *icon* partai. Hal ini penting karena banyak isu yang diangkat secara nasional, tetapi tidak dikemas dengan baik sehingga tidak mendapat perhatian dari masyarakat.

Penentuan tema kampanye merupakan suatu hal yang sangat penting. Tema diibaratkan sebuah produk yang mau dipasarkan, sehingga ia harus dikemas dengan

baik. Tema menjadi penting karena dalam setiap pemilu partai selalu menyetujui tiga hal, yakni program, citra dan kepribadian calon yang relevan dengan tema. Tema tidak boleh ditentukan begitu saja, melainkan harus menjadi kesepakatan para pimpinan teras partai dan calon yang akan diusung. Biasanya tema dimunculkan oleh orang-orang yang memiliki daya imajinatif yang tinggi.

Tabel V.9 Tanggapan responden dalam menentukan tema kampanye apakah pernah meminta kesepakatan pimpinan partai dan calon yang diusung.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sering	17	60
2	Kadang-kadang	8	29
3	Tidak pernah	3	11
Jumlah		28	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2010

Tabel diatas menunjukkan 17 orang atau 60% responden yang menjawab dalam menentukan tema kampanye sering meminta kesepakatan pimpinan partai dan calon yang diusung, 8 orang responden atau sekitar 29% menjawab kadang kadang, dan 3 orang atau sekitar 11% responden menjawab tidak pernah. Hal ini sudah bisa dikatakan bahwa Partai Keadilan Sejahtera sudah memperhatikan strategi yang baik dalam berkampanye.

V.3.2 Mempersiapkan Personel Yang Handal Dalam Berkampanye

Mempersiapkan personel yang handal dalam berkampanye harus dilakukan partai politik, agar pesan dan tujuan dari kampanye dapat disampaikan dengan baik. Tanpa membuat kesalahan yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari masyarakat. Berikut ini akan dipaparkan didalam tabel berupa tanggapan responden dalam mempersiapkan personel yang handal dalam berkampanye.

Table V.10 Tanggapan responden dalam mempersiapkan personel yang handal dalam berkampanye.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sering	20	71
2	Kadang-kadang	5	18
3	Tidak pernah	3	11
Jumlah		28	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2010

Tabel diatas mendeskripsikan bahwa responden dalam mempersiapkan personel yang handal dalam berkampanye sebanyak 20 orang yaitu sekitar 71%, responden menyatakan sering, sekitar 5 orang atau sekitar 18% menyatakan kadang kadang dan 3 orang atau sekitar 11% responden menyatakan tidak pernah, sehingga menjadi suatu kewajaran apabila Partai Keadilan Sejahtera masih mampu bertahan dan mendapat simpatik dari masyarakat.

V.3.3 Berkampanye dengan melibatkan Artis dan Selebritis

Untuk mengetahui pendapat responden apakah mereka dalam berkampanye sering melibatkan Artis dan Selebritis.

Tabel V.11 Tanggapan Responden apakah mereka berkampanye melibatkan Artis dan Selebritis.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sering	4	14
2	Kadang-kadang	9	32
3	Tidak pernah	15	54
Jumlah		28	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2010

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa 4 orang atau sekitar 14% responden menyatakan sering melibatkan Artis dan Selebritis dalam berkampanye, 9 orang atau sekitar 32% responden menyatakan kadang kadang, sedangkan 15 orang atau sekitar 54% menyatakan tidak pernah. Dari jawaban responden diatas dapat diartikan bahwa stratgi Partai Keadilan Sejahtera dalam memenangkan pemilu masih kurang melibatkan para Artis dan Selebritis, hal ini dilakukan Partai Keadilan Sejahtera untuk menguatkan *image* partai sebagai partai islam dan dakwah.

V.3.4 Berkampanye dengan melakukan perang urat saraf dan humor politik.

Perang urat saraf dan humor politik adalah suatu kegiatan komunikasi yang erat kaitannya dengan persuasi. Sekarang perang urat saraf dan humor politik bertebaran dimana-mana sehingga orang dengan mudah terkecoh dan beralih ketujuan awal.

Untuk mengetahui apakah PKS dalam berkampanye melakukan perang urat saraf dan humor politik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel V.12 Tanggapan Responden apakah PKS menggunakan perang urat saraf dan humor politik.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sering	8	29
2	Kadang-kadang	11	39
3	Tidak pernah	9	32
Jumlah		28	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2010

Tabel diatas menunjukkan bahwa responden menyatakan sering melakukan perang urat saraf dan humor politik dalam berkampanye adalah 8 orang, atau 29%, sedangkan yang menjawab kadang-kadang 11 orang yaitu sekitar 39% dan yang menjawab tidak pernah 9 orang atau sekitar 32%. Ini menunjukkan bahwa PKS belum

semaksimal mungkin menggunakan peluang yang ada dalam melakukan perang urat saraf dan humor politik.

V.3.5 Bekampanye dengan propaganda politik

Propaganda adalah suatu kegiatan komunikasi yang erat kaitannya dengan persuasi. Sekarang propaganda bertebaran dimana-mana sehingga orang dengan mudah terkecoh mulai dari model propaganda komersial sampai pada propaganda politik.

Untuk mengetahui apakah PKS dalam berkampanye selalu melakukan propaganda politik dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel V.13 Tanggapan responden dalam berkampanye melakukan propaganda politik.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sering	2	7,2
2	Kadang-kadang	6	21,4
3	Tidak pernah	20	71,4
Jumlah		28	100%

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian 2010*

Dari tabel V.13 diatas terdapat 2 responden atau 7,2% mengatakan sering dan 6 atau 21,4% dari responden mengatakan kadang-kadang kemudian terakhir

terdapat 20 atau 71,4 % dari responden mengatakan tidak pernah melakukan propaganda didalam berkampanye. Hal ini dilakukan PKS sebagai partai islam dan dakwah ingin memberikan contoh atau sikap yang islami dalam perpolitikan.

V.3.6 Berkampanye dengan menggunakan media politik

Menjelang pemilu, masyarakat dibombardir informasi politik melalui berbagai macam media promosi, mulai TV, radio, surat kabar, tabloid, majalah dan yang lainnya.

Untuk mengetahui apakah PKS dalam berkampanye selalu menggunakan media politik dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel V.14 Tanggapan responden mengenai kampanye dengan menggunakan media politik.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sering	26	93
2	Kadang-kadang	2	7
3	Tidak pernah	0	0
Jumlah		28	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2010

Dari tabel V.14 diatas terdapat 26 responden atau 93% mengatakan sering melakukan kampanye dengan menggunakan media politik dan 2 responden atau 7% dari responden mengatakan dan 0,00% yang mengatakan tidak pernah.

Hal ini membuktikan bahwa strategi berkampanye dengan menggunakan media oleh PKS telah dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

V.3.7 Evaluasi terhadap efektivitas kampanye

Efektivitas sebuah kampanye hanya bisa diketahui dengan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan dua cara, yakni:

1. Evaluasi Program

Evaluasi program bisa disebut evaluasi summatif. Evaluasi ini memiliki fokus antara lain.

- a. Untuk melihat sejauh mana tujuan akhir yang ingin dicapai (*goal*) dari suatu kegiatan, apakah terpenuhi atau tidak.
- b. Untuk melakukan modifikasi tujuan program dan strategi.

2. Evaluasi Manajemen

Evaluasi manajemen bisa disebut evaluasi formatif. Efalulasi ini memiliki fokus terhadap pencapaian operasional kegiatan berikut.

- a. Apakah hal-hal yang dilakukan masih dalam tataran rencana yang telah ditetapkan semula?
- b. Apakah pelaksanaan kegiatan berjalan lancar atau tidak?
- c. Apakah usaha yang dilakukan itu mengalami kemajuan atau tidak?

- d. Apakah ada hambatan atau kemacetan yang ditemui dalam operasional atau tidak?
- e. Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut, apakah dengan cara modifikasi langkah-langkah yang akan diambil atau menambah komponen yang bisa memperlancar jalannya kegiatan?

Untuk mengetahui apakah responden telah melaksanakan evaluasi terhadap efektivitas kampanye dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel V.15 Tanggapan responden dalam melaksanakan evaluasi terhadap eektivitas kampanye.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sering	22	78,6
2	Kadang-kadang	5	17,8
3	Tidak pernah	1	3,6
Jumlah		28	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2010

Dari tabel V.15 diatas terdapat 22 responden atau 78,6% mengatakan sering melaksanakan evaluasi terhadap eektivitas kampanye dan 5 atau 17,8% dari responden mengatakan kadang-kadang kemudian terahir terdapat 1 atau 3,6% dari

responden mengatakan tidak. Hal ini lah membuktikan bahwa PKS mampu bertahan sebagai salah satu partai islam dan dakwah dibandingkan partai islam lainnya.

V.3.8 Melakukan uji awal (*pretesting*) dan uji akhir (*pos-testing*) dari proses kampanye

Uji awal biasanya dilakukan untuk mengetahui apakah pesan-pesan komunikasi yang akan disampaikan sudah sesuai dengan kebutuhan target sasaran. Sedangkan uji akhir dilakukan untuk melihat hasil proses komunikasi yang telah dilaksanakan, apakah cukup efektif sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Tabel V.16 Tanggapan responden dalam melakukan uji awal dan uji akhir dari proses kampanye.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sering	18	64,3
2	Kadang-kadang	6	21,4
3	Tidak pernah	4	14,3
Jumlah		28	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2010

Dari tabel V.16 diatas terdapat 18 responden atau 64,3% mengatakan sering melakukan uji awal dan uji akhir dari proses kampanye dan 6 atau 21,4% dari responden mengatakan kadang-kadang kemudian terahir terdapat 4 atau 3,6% dari

responden mengatakan tidak. Dengan melaksanakan uji awal (*pretesting*) dan uji akhir(*pos-testing*) partai akan mengetahui apakah program yang telah direncanakan telah berhasil atau tidak, hal ini dilakukan untuk evaluasi dimasa akan datang.

V.3.9 Hasil yang diperoleh dari berkampanye

Untuk mengetahui apakah responden telah merasa puas terhadap hasil kampanye yang telah dilakukan dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel V.17 Tanggapan responden terhadap hasil yang diperoleh dari kampanye.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sudah	13	46,4
2	Kadang-kadang	9	32,2
3	Tidak pernah	6	21,4
Jumlah		28	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2010

Dari tabel V.15 diatas terdapat 13 responden atau 46,4% mengatakan sudah puas dari perolehan hasil kampanye dan 9 atau 32,2% dari responden mengatakan kadang-kadang kemudian terahir terdapat 6 atau 21,4% dari responden mengatakan tidak.

Dari keterangan diatas sebaiknya PKS tidak harus merasa puas dengan hasil yang diperoleh sekarang, karena hal ini akan memberikan semangat yang terhadap PKS untuk memperoleh dukungan yang lebih untuk dimasa yang akan datang.

V.4 Wawancara Terhadap Strategi Politik Partai dalam Memenangkan Pemilu

Wawancara atau Interview, yaitu: pengumpulan data oleh peneliti dengan cara menanyakan secara langsung kepada Aktivist Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru untuk mendapatkan informasi-informasi yang valid baik menggunakan alat pencatat maupun alat bantu lainnya adapun pertanyaan yang penulis sajikan antara lain sebagai berikut

V.4.1 Menurut Bapak/Ibu apakah calon-calon yang telah diajukan oleh partai pada pemilu 2009 mampu membawa nama baik partai untuk kedepannya?

Tabel V.18 Tanggapan responden apakah calon-calon yang telah diajukan oleh partai pada pemilu 2009 mampu membawa nama baik partai untuk kedepannya.

No	Pertanyaan yang penulis Lontarkan	Tanggapan responden	
		Pengurus DPD	Ketua DPC
1	Apakah calon-calon yang telah diajukan oleh partai pada pemilu 2009 mampu membawa nama baik partai?	Mampu	Mampu

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2010

Adapun hasil tabel V.18 merupakan tanggapan responden saat diadakan wawancara mendalam ;

1. Oleh : Pengurus DPD PKS Pekanbaru

Jabatan : Sekretriati

Dalam hal ini, kemampuan calon yang diusung biasanya sudah melalui proses penyaringan yang ketat yang telah dilakukan oleh partai. Jadi, tidak diragukan lagi kemampuan mereka, calon yang diusung merupakan kader yang terbaik dari partai. Yakni telah memenuhi faktor kualitas dan peluang (jaringan). Kualitas kader berkaitan dengan kredibilitas personal, yakni profesionalitas integritas moral dan keluwesan sosial.

Selain itu calon yang diusungkan sudah dilatih melalui penataan kader, yaitu upaya penyiapan kualitas kader, melalui pengembangan dan pemungisian potensi

kader. Secara kolektif, upaya ini akan memperlebar peluang mobilitas vertikal kader dakwah. Karena penataan kader adalah bagian vital bagi perencanaan maupun implementasi kebijakan.

2. Oleh : Pengurus DPD PKS Pekanbaru

Jabatan : Ketua Kebijakan Publik

Kader yang telah diusung akan mampu membawa nama baik partai. Karena kader yang akan dicalonkan sudah melalui pemberdayaan kader, sudah melewati beberapa proses, bukanlah proses yang sekali jadi atau seperti menanam jagung yang hasilnya segera dapat dipanen dalam waktu singkat. Proses pemberdayaan kader dalam bingkai pengembangan potensi adalah proses seperti “menanam jati”, yang hasilnya baru dapat dipanen puluhan tahun mendatang. Sebagai sebuah proses yang bertahap, proses pembinaan kader memerlukan kesabaran dan wawasan. Untuk memunculkan seorang ahli/pakar dibidang tertentu, maka secara cultural kader harus melalui tahapan demi tahapan jenjang karir.

3. Oleh : Ketua DPC PKS

Jabatan : Ketua DPC

Kader yang di usung dalam pemilu legislative akan mampu mengangkat nama baik partai karena kader tersebut telah memenuhi kriteria untuk dicalonkan sebagai wakil rakyat.

Partai Keadilan Sejahtera sebagai Partai Dakwah berupaya mengoptimasi kemampuan kader kami, dengan tujuan seluruh potensi kader yang terhimpun dapat berkembang dan berfungsi optimal, untuk mendukung dan memperkuat gerak dan perkembangan dakwah.

V.4.2 Menurut Bapak/Ibu apakah strategi yang telah dilaksanakan partai pada pemilihan umum legislatif 2009 sudah berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang memuaskan?

Permasalahan yang sering menjadi isu besar dalam perspektif akademik dan intelektual bahwa keberhasilan dari sebuah strategi adalah ketepatan dalam membuat sebuah perencanaan strategis dan perencanaan ini pada gilirannya akan menentukan perubahan-perubahan yang harus dilakukan dalam usaha mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi.

Disini dapat dinyatakan bahwa inti dari perencanaan adalah merumuskan sebuah strategi. Perencanaan yang benar dan tepat harus dapat memotivasi untuk melakukan berbagai perubahan agar tujuan dapat tercapai. Ini berarti bahwa strategi mempunyai peran yang sangat vital dalam mengarahkan berbagai perubahan yang harus dilakukan. Dengan demikian dapat dilihat bahwa strategi mempunyai pengaruh sangat besar dalam keberhasilan sebuah perencanaan dan sekaligus sangat berpengaruh dalam menentukan arah perubahan yang akan dilakukan.

Berikut ini akan disajikan tanggapan reponden tentang strategi yang telah dilaksanakan partai pada pemilu legislatif 2009 apakah sudah berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang memuaskan?

Tabel V.19 Tanggapan responden terhadap, apakah strategi yang telah dilaksanakan partai pada pemilu legislatif 2009 sudah berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang memuaskan?

N O	Pertanyaan yang penulis lontarkan	Tanggapan responden		
		Pengurus DPD	Anggota DPRD	Ketua DPC
2	apakah strategi yang telah dilaksanakan partai pada pemilu legislatif 2009 sudah berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang memuaskan?	Sudah	Sudah	Cukup

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2010

Adapun dari hasil tabel V.21 tersebut merupakan hasil wawancara yang dilakukan kepada:

1. Oleh : Pengurus DPD Pks Pekanbaru

Jabatan : Wakil Sekretariat

Strategi yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik karena semua strategi didukung oleh kader dan simpatisan yang baik bahkan sebagian masyarakat telah mendukungnya.

Secara ringkas, sebagai Partai Dakwah tentunya strateginya adalah melalui dakwah yang dilalui tiga fase perjuangan (*mahawir ad dakwah*) :

1. *Mihwar Tanzhimi*, pada tahap ini fokus utama daakwah adalah konsolidasi dan pembinaan kader. Tahap ini merupakan suatu keniscayaan dalam pembangunan kekuatan internal. Karenanya kata kunci gerakan dakwah pada fase ini adalah pengokohan internal, baik dari segi infrastruktur maupun dari suprastruktur dakwah.
2. *Mihwar Sya'bi*, orbit masyarakat. Dimana aktivitas dakwah mulai mengalirkan energinya untuk kepentingan masyarakat secara murni melalui gerakan *amar ma'ruf wa nahyi munkar*, yakni layanan dalam berbagai bidang kehidupan, melalui instrumen organisasi. Terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat dan berbagai kegiatan lainnya.
3. *Mihwar Muasasi*, Orbit pelembagaan. Dimana kader dakwah mulai masuk kedalam lembaga publik, baik diparlemen, birokrasi maupun lembaga-lembaga profesi lainnya. Mereka berkontribusi dalam lembaga-lembaga tersebut dengan menampakkan integritas moral serta kualitas profesional dan kepakarannya.

Sedangkan hasil dari pemilu belum begitu memuaskan, karena kami berharap untuk pemilu dimasa akan datang hasil yang diperoleh lebih baik dari hasil yang ada sekarang ini.

2. Oleh : Kader PKS Pekanbaru

Jabatan : Anggota DPRD PKS Pekanbaru

Strategi PKS sudah berjalan dengan baik, kekuatan dakwah sangat diperlukan dalam masyarakat karena mereka basis kekuatan bagi para aktivis dan kader dakwah dalam rangka memaparkan gerakan perubahan. Bila landasan kekuatan masyarakat ini rapuh, maka akan rapuh pula bangunan dakwah di atasnya. Umumnya masyarakat selalu melihat fenomena dakwah dari hal-hal konkrit di depan mata mereka. Sementara itu kita pahami tidak semua kebijakan dakwah dapat dimunculkan ke permukaan. Oleh karena itu diperlukan payung atau wajah (cover) yang tepat untuk berbagai posisi dan keadaan.

Untuk hasil pemilu hanya cukup memuaskan, tapi kami berharap semoga yang akan datang akan lebih baik lagi.

3. Oleh : DPC PKS Pekanbaru

Jabatan : Ketua DPC

Iya, strategi yang telah dilaksanakan telah berjalan dengan baik. Sebagai gerakan Partai Dakwah yang menyeluruh dalam berbagai sektor (Sektor publik,

sektor swasta, dan kader dengan berbagai disiplin ilmu dan profesi, dengan kekuatan integritas moral-religius dan kualitas-profesional.

Partai Keadilan Sejahtera sebagai Partai Dakwah berupaya mengoptimalkan kader dalam berbagai disiplin ilmu untuk berkembang dan berfungsi mendukung dan memperkuat gerakan kultural dan struktural transformasi bangsa.

Sedangkan hasil yang diperoleh pada pemilu legislatif 2009 *alhamdulillah* kami mensyukurinya, namun besar harap semoga dimasa akan datang akan lebih baik lagi.

5.4.3 Menurut Bapak/Ibu apakah faktor psikologis dan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) merupakan faktor yang penting yang harus dimiliki oleh seorang calon yang akan diusung ?

Tabel V.20 Tanggapan responden faktor psikologis dan SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) merupakan faktor yang penting yang harus dimiliki oleh seorang calon yang akan diusung.

No	Pertanyaan yang penulis lontarkan	Tanggapan responden		
		Pengurus DPD	Anggota DPRD	Ketua DPC
3	apakah faktor psikologis dan SARA merupakan faktor yang penting yang harus dimiliki oleh seorang calon yang akan diusung?	Cukup	Penting	Cukup

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2010

Adapun dari hasil tabel V.20 tersebut merupakan hasil wawancara yang dilakukan kepada:

1. Oleh : Pengurus DPD Pks Pekanbaru

Jabatan : Ketua Pembinaan Kader

Calon yang diusung merupakan orang yang telah diakui. Baik itu kredibilitasnya, loyalitasnya, kecerdasannya dan ketokohnya dalam masyarakat. Karena sebelumnya kader-kader tersebut telah dimana dalam suatu proses yang cukup panjang. Jadi, sebenarnya faktor SARA tidak menjadi faktor utama dalam penentuan calon yang akan diusung tetapi hanya faktor pendukung yang harus dipertimbangkan. Bagaimana pun kita perlu kader-kader yang mempunyai massa dan figur yang dikenal oleh masyarakat.

Faktor psikologis itu sangat penting karena orang yang sehat secara psikologis jauh lebih baik, selain itu karena tugas yang diemban nantinya sangat berat maka faktor psikologis seorang calon sangat menentukan.

2. Oleh : Pengurus DPD Pks Pekanbaru

Jabatan : Ketua Kebijakan Publik

Sebenarnya faktor SARA ini sangat rawan dan sensitif dalam setiap pemilihan umum, karena akan menjadi sumber isu untuk diterima atau tidaknya seorang kandidat. Karena sikap fanatisme ini yang sangat kuat pada budaya masyarakat kita tidak heran jika ada daerah tertentu yang tidak bisa dimasuki oleh kandidat atau partai lain. Karena PKS merupakan Partai Islam dan dakwah makanya kader-kader kita diutamakan yang muslim, seorang tokoh atau figur yang tidak pernah cacat hukum. Karena orang yang baik pasti nantinya akan membawa hasil yang baik pula.

Faktor psikologis, merupakan faktor yang penting yang harus dimiliki oleh seorang kader.

3. Oleh : Kader Pks Pekanbaru

Jabatan : Anggota DPRD Pks

Sebenarnya faktor tersebut tidaklah begitu berpengaruh, tapi bukannya tidak penting. Karena masyarakat kita sudah cerdas, dewasa ini ibu-ibu rumah tangga juga sudah tahu berpolitik untuk menilai seorang calon yang akan mereka pilih.

Mereka tidak perlu janji-janji manis, mereka perlu bukti yang nyata yang telah dilakukan seorang calon.

V.4.4 Menurut Bapak/Ibu apakah ada perbedaan antara strategi yang dilaksanakan pada pemilu 2009 dengan pemilu sebelumnya ?

Tabel V.21 Tanggapan responden perbedaan antara strategi yang dilaksanakan pada pemilu 2009 dengan pemilu sebelumnya?

No	Pertanyaan yang penulis lontarkan	Tanggapan responden		
		Pengurus DPD	Anggota DPRD	Ketua DPC
4	apakah ada perbedaan antara strategi yang dilaksanakan pada pemilu 2009 dengan pemilu sebelumnya ?	Ada	Ada	Ada

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian 2010

Adapun dari hasil tabel V.21 tersebut merupakan hasil wawancara yang dilakukan kepada:

- Oleh : Pengurus DPD Pks Pekanbaru
Jabatan : Ketua Kebijakan Publik

Pada pemilu 2004 strategi partai dalam mempromosikan diri menggunakan lambang dan simbol-simbol partai, slogan 'Bersih dan peduli' telah kami terapkan sebagai partai dakwah yang bebas dari korupsi. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa 'Bersih dan Peduli' bukan semata slogan, tapi kristalisasi bukti-bukti dilapangan. 'Bersih dan Peduli' dengan mudah diatribusikan kepada PKS karena memang nilai-nilai itu dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Sampai kader tertentu 'Bersih dan Peduli' telah menjadi *brand image* sekaligus *specific knowledge* PKS. *Brang image* terkait dengan pencitraan diri, sementara *specific knowlege* terkait dengan penciptaan nilai dan penyebaran manfaat.

Sedangkan pada pemilu 2009 selain mempromosikan partai Pks lebih mengandalkan figur atau kader yang diusung, kader-kader yang kami usung pada pemilu 2009 masih memprioritaskan anggota anggota DPRD 2004 karena mereka mempunyai pengalaman yang lebih dan mereka mempunyai banyak massa. Untuk membuktikan bahwa kami sebagai Partai Dakwah yang 'Bersih dan Peduli' kami lebih banyak mengadakan kegiatan bakti sosial kemasyarakatan. Misalnya : pengobatan gratis, memberi bantuan-bantuan kemasjid dan lain sebagainya.

Kader merupakan perjuangan utama kami. Kader yang telah dibentuk sudah mempunyai ikatan tanpa pamrih, dari pembinaan yang telah kami lakukan.

2. Oleh : Kader Pks Pekanbaru

Jabatan : Anggota DPRD Pks

Berbicara tentang strategi yang dilakukan pada pemilu 2004, citra 'Bersi dan Peduli' masih melekat dalam ikatan kami, citra merupakan buah atau cermin dari orsinalitas. Citra tidak dapat diciptakan dengan kemasan dan pemasaran semata, secanggih apapun. Kemasan dan pemasaran tanpa orsinalitas melahirkan citra semu. Citra sejati dibangun oleh orsinalitas ditambah kemasan dan pemasaran yang baik. Sedangkan peduli cermin kesalehan sosial. Untuk dapat memimpin bangsa dibutuhkan kesalehan profesional.

Sedangkan pada pemilu 2009 Pks lebih mengutamakan figur kader kami yang diusung untuk maju dalam pemilu legislatif 2009, pembinaan kader yang telah dilakukan, membuat kami percaya orang yang baik akan menghasilkan yang baik pula. Oleh karena itu figur yang bersih, peduli dan bebas korupsi menjadi sebuah *image* partai pada pemilu 2009.

3. Oleh : DPC PKS Pekanbaru

Jabatan : Ketua DPC

Partai politik akan semakin kuat ditengah-tengah masyarakat jika memiliki infrastruktur sampai ke tingkat desa. Karena itu modal inilah yang diharapkan Dengan merambahnya infrastruktur PKS ke seluruh pelosok. PKS akan terus meningkatkan kualitas dan kompetensi kader-kader PKS, dengan mengadakan serangkaian program capacity building (Membangun kapasitas). Para

kader PKS, struktur partai atau kader harus memiliki kompetensi dan kemampuan untuk mengelola pemerintahan. Kader PKS harus memberi solusi kepada masyarakat sebagai bagian dari semangat psikososial PKS. PKS akan membentuk kelompok-kelompok kader-kader partai yang punya kompetensi, mencetaknya menjadi public figure, menjadi tokoh-tokoh dan panutan masyarakat. Tokoh-tokoh inilah bersama masyarakat dan komponen bangsa yang lain mengelola bangsa Indonesia dimasa yang akan datang.

Jika pada 2004 memilih lambang partai sedangkan pada pemilu 2009 langsung memilih calon. Maka tentunya figur dari calon menjadi promosi utama selain citra dari partai. Karena memang kader-kader yang diusung telah melalui tahap-tahap seleksi dalam proses yang sangat panjang.

V.4.5. Rekapitulasi Hasil Penelitian

Tabel V. 22

**REKAPITULASI STRATEGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DALAM
MEMILIH CALON YANG AKAN DIUSUSNG**

Nomor Item	A		B		C	
	F	P	F	P	F	P
1	18	64%	8	29%	2	7%
2	22	79%	4	14%	2	7%
3	24	85,7%	3	10,7%	1	3,6%
4	16	57%	7	25%	5	18%
5	6	21,4%	13	46,4%	9	32,2%
Jumlah	86		35		19	

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian 2010*

TABEL V.23
REKAPITULASI STRATEGI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DALAM
BERKAMPANYE

Nomor Item	A		B		C	
	F	P	F	P	F	P
1	17	60%	8	29%	3	11%
2	20	71%	5	18%	3	11%
3	4	14%	9	32%	15	54%
4	8	29%	11	39%	9	32%
5	2	7,2%	6	21,4%	20	71,4%
6	26	93	2	7	0	0%
7	22	78,6%	5	17,8%	1	3,6%
8	18	64,3%	6	21,4%	4	14,3%
9	13	46,4%	9	32,2%	6	21,4%
Jumlah	130		61		61	

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian 2010*

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis menguraikan beberapa kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang telah penulis laksanakan, dari kesimpulan tersebut penulis memberikan beberapa saran yang dapat memberikan masukan pada Partai Keadilan Sejahtera Pekanbaru tentang strategi yang akan digunakan dalam pemilihan umum.

VI.1 Kesimpulan Penelitian

VI.1.1 Dalam memilih calon yang akan diusung dalam pemilihan umum, partai memang memiliki kewenangan dalam hal tersebut. Memilih calon dari aktivis partai lebih diutamakan karena partai sudah mengerti betul kemampuan yang dimiliki calon selain itu partai dapat mengevaluasi proses pembinaan yang telah dilakukan. Secara umum partai sudah benar dalam memilih calon yang diusung dalam pemilihan umum. Hal ini terlihat dari 28 respon, terdapat 18 atau 64% responden menyatakan sering memilih calon dari aktivis partai. Hal ini merupakan salah satu strategi dari Partai Keadilan Sejahtera dalam memenangkan pemilu legislative 2009.

VI.1.2 Calon yang terbaik diusung oleh partai dalam pemilihan umum ialah calon yang bisa mengangkat nama baik partainya. Dalam hal ini Partai Keadilan Sejahtera telah berhasil membina kader untuk partainya, hal ini dapat dilihat terdapat 22 responden atau 79% menyatakan bahwa calon yang telah diusung telah berhasil mmengangkat nama baik partai. Hal ini mungkin dikarenakan yang maju dalam pemilihan umum telah melalui pembinaan yang matang melewati tahap demi tahap.

VI.1.3 Agar calon yang diusung partai dalam pemilihan umum mendapat dukungan dan simpatik masyarakat, ada beberapa unsur yang harus diperhatikan untuk penentuan calon yaitu unsur psikologis dan SARA. Karena factor tersebut paling mudah dijual, orang akan merasa memiliki kepada calon atau partai karena kesamaan suku, budaya, daerah dan Agama. Dalam hal ini terdapat 16 atau 57% responden menyatakan sering memilih calon dengan memperhatikan unsur psikologis dan SARA. Ini dilakukan Partai Keadilan Sejahtera karena factor tersebutlah yang membuat Partai Keadilan Sejahtera mampu untuk bertahan hidup ditengah banyaknya kemunculan partai-partai politik.

- VI.1.4 Sebanyak 6 atau 21,4% responden menyatakan sering memilih calon dari luar anggota partai. Dalam menentukan calon yang maju dalam pemilihan umum figur seorang calon dan massa yang dimiliki sangat baik untuk direkrut. Karena dengan begitu partai akan mudah dikenal oleh masyarakat.
- VI.1.5 Dapat dikatakan Partai Keadilan Sejahtera tetap mampu bertahan dan mendapat dukungan dari masyarakat banyak dikarenakan kader-kader PKS merupakan kader yang telah dibentuk melewati seleksi dan uji kemampuan dari berbagai bidang.
- VI.1.6 Sebanyak 17 atau 60% responden yang menyatakan sering meminta kesepakatan dari pimpinan partai dan calon yang diusung dalam menentukan tema kampanye.
- VI.1.7 Mempersiapkan personel yang handal dalam berkampanye harus dilakukan partai politik, agar pesan dan tujuan dari kampanye dapat disampaikan dengan baik. Terdapat 20 atau 71% responden menyatakan sering mempersiapkan personel yang handal dalam berkampanye. Hal ini dilakukan Partai Keadilan Sejahtera karena sebagai sebuah strategi yang baik dalam memperoleh dukungan masyarakat.

- VI.1.8 Dalam berkampanye untuk memperoleh dukungan yang lebih dari masyarakat, keterlibatan Artis dan Selebritis sangatlah perlu untuk menggalang massa, massa senang sekali mendengar nyanyian dari para Artis dan Selebritis. Terdapat 4 atau 14% respon menyatakan sering melibatkan artis dalam berkampanye. Sedikitnya responden yang melibatkan Artis dan Selebritis hal ini mungkin untuk menjaga *image* partai sebagai Partai Islam dan Dakwah.
- VI.1.9 Terdapat 8 atau 29% respon yang menyatakan sering melakukan perang urat saraf dan melakukan humor politik dalam berkampanye. Dalam hal ini mungkin untuk memperoleh dukungan partai lebih terfokus kepada dakwah dari pada melakukan perang urat saraf dan humor politik.
- VI.1.10 Menjelang pemilihan umum, masyarakat sering melihat berbagai informasi dari berbagai media. Karena media merupakan factor penguang dalam mempromosikan calon atau partai. Dalam hal ini terdapat 26 atau 93% responden menyatakan sering menggunakan media dalam berkampanye.
- VI.1.11 Terdapat 18 atau 64,3% responden menyatakan sering melakukan uji awal dan uji akhir dari kegiatan kampanye yang telah dilakukan.

VI.2 Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, penulis memberikan saran yang dapat dijadikan masukan bagi partai dalam rangka untuk memenangkan pemilu legislative dimasa akan datang :

- VI.2.1 Sebagai partai Islam dan Dakwah hendaknya calon yang diusung harus mampu mempertahankan citra baik partai dan menunjukkan kinerja yang baik dan membanggakan agar citra baik tersebut dapat dipandang masyarakat sebagai partai tauladan.
- VI.2.2 Walaupun Aktivis partai lebih baik untuk dicalonkan dalam pemilihan umum namun calon diluar anggota partai yang berpotensi dan mempunyai banyak massa sangatlah menguntungkan partai dalam pertarungan meraih perolehan suara yang sebanyak mungkin. Jadi, seharusnya Partai Keadilan Sejahtera harus jeli memperhatikan tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai massa dan pengaruh yang besar di masyarakat.
- VI.2.3 Dalam memenangkan pemilihan umum dan untuk memperoleh dukungan massa yang lebih peran Artis dan Selebritis sangatlah besar, walaupun Partai Keadilan Sejahtera merupakan Partai Islam dan Dakwah, untuk menjaga *image* partai sekaligus memperoleh dukungan massa partai bisa menggunakan artis dan selebritis yang lebih religi.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2006.
- Cangara, Hafied. *Komunikasi Politi*, Jakarta : Rajawali Persada. 2009.
- Huntington, Samuel P. *Tertib Politik Pada Masyarakat Yang Sedang Berubah*. Jakarta:Raja Grafindo Persada. 2004.
- Hardiansyah, Maitor. *Pola Rekrutmen dan Pendidikan Politik PKS di Indonesia*. Skripsi Fisipol Unri. 2008
- Kansil, Christin S.T. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 2004
- Kansil, Christin S. T. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara. 2008.
- Liit, Michael A. Dkk. *Manajemen Strategis*. Jakarta : Erlangga. 1997.
- Majelis Pertimbangan Pusat PKS. *Memperjuangkan Masyarakat Madani*. 2008
- Mann, Richard. *Memperjuangkan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: PT. Enka Parahiyangan. 1999.
- Marsono. *Membangun Kerukunan Berpolitik dan Beragama di Indonesia*. Jakarta : 2002
- Rivai, veithzal. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Rodee, Carlton Ciymer Dkk. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

2002.

Soedijarto Dkk. *Bungkarno dan Partai Politik*. Jakarta : PT. Grasindo. 2001

Sudarsono, Juwono. *Politik, Ekonomi dan Strategi*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka
Utama.1995.

Supriyono, R.A. *Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
1998.

Susanti, Susi. *Strategi Partai Golkar dalam Memenangkan Pemilu 2004*. Skripsi
Fisipol Unri. 2008

Syafie, Inu Kencana. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi
aksara. 2006.

Thoha, Miftah. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
2003.

Thoha, Miftah. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media
Group.2008

<http://mediacenter.kpu.co.id>

<http://www.pks.or.id>

<http://kompas.com>

DAFTAR TABEL

TABEL I.1	Perolehan suara 5 besar partai politik pada Pemilu tahun 2009	10
TABEL I.2	Perolehan suara 5 besar partai politik pada Pemilu 2004 di Pekanbaru	12
TABEL I.3	Perolehan suara 5 besar partai politik pada Pemilu 2009 di Pekanbaru	13
TABEL I.4	Perolehan kursi 5 besar partai politik pada Pemilu 2009 di Pekanbaru	14
TABEL III.1	Jumlah populasi dalam penelitian	46
TABEL V.1	Jawaban responden tentang pendidikan	61
TABEL V.2	Penempatan kedudukan dalam struktur organisasi	61
TABEL V.3	Keadaan umur responden penelitian	62
TABEL V.4	Tanggapan responden mengenai memilih calon dari aktivis partai	64
TABEL V.5	Tanggapan responden mengenai calon yang diusung telah berhasil mengangkat nama baik partai	66
TABEL V.6	Tanggapan responden mengenai calon yang diusung lebih sering menggunakan <i>polling</i>	67
TABEL V.7	Tanggapan responden apakah menentukan calon sering diperhatikan factor psikologis dan SARA	68
TABEL V.8	Tanggapan responden terhadap memilih calon diluar anggota partai	69
TABEL V.9	Tanggapan responden dalam menentukan tema kampanye apakah pernah meminta kesepakatan pimpinan partai dan calon yang diusung	71
TABEL V.10	Tanggapan responden dalam mempersiapkan	

	personel yang handal dalam berkampanye	72
TABEL V.11	Tanggapan Responden apakah mereka berkampanye melibatkan Artis dan Selebritis	73
TABEL V.12	Tanggapan Responden apakah PKS menggunakan perang urat saraf dan humor politik	74
TABEL V.13	Tanggapan responden dalam berkampanye melakukan propaganda politik	75
TABEL V.14	Tanggapan responden mengenai kampanye dengan menggunakan media politik	76
TABEL V.15	Tanggapan responden dalam melaksanakan evaluasi terhadap eektivitas kampanye	78
TABEL V.16	Tanggapan responden dalam melakukan uji awal dan uji akhir dari proses kampanye	79
TABEL V.17	Tanggapan responden terhadap hasil yang diperoleh dari kampanye	80
TABEL V.18	Tanggapan responden apakah calon-calon yang telah telah diajukan oleh partai pada pemilu 2009 mampu membawa nama baik partai untuk kedepannya	81
TABEL V.19	Tanggapan responden terhadap, apakah strategi yang telah dilaksanakan partai pada pemilu legislatif 2009 sudah berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang memuaskan	84
TABEL V.20	Tanggapan responden faktor psikologis dan SARA merupakan faktor yang penting yang harus dimiliki oleh seorang calon yang akan diusung	87
TABEL V.21	Tanggapan responden perbedaan antara strategi yang dilaksanakan pada pemilu 2009 dengan pemilu sebelumnya	90
TABEL V.22	Rekapitulasi strategi PKS dalam memilih calon yang akan diusung	93
TABEL V.23	Rekapitulasi strategi PKS dalam berkampanye	94